



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 21.a TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3 Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- 5 Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga yang ada pada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- 6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Lombok Tengah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan untuk periode anggaran 2021.

BAB II
KAIDAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diimplementasikan dalam periode satu tahunan memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan.

Pasal 3

RKPD berisi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang telah dikompilasi dengan hasil-hasil usulan pembangunan dari masyarakat melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa hingga Kabupaten.

Pasal 4

RKPD merupakan Dokumen Indikator Kinerja SKPD yang terukur dan terbagi dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai Fungsi.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) RKPD disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.

(2) Sistematika penyusunan RKPD:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tema Pembangunan Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.3 Kerangka Kebijakan Strategis Daerah

4.4 Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB IV

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD dengan mengacu pada Kebijakan Umum APBD dan target capaian kinerja.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut dari RKPD menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
Pada tanggal 6 Juli 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya,
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus menjadi satu kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi serta potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hirarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas : perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Renja SKPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik berasal dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Dalam prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 merujuk pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2011–2031 Kabupaten Lombok Tengah, khususnya memasuki tahap ke-5 RPJMD tahun 2016–2021. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2021 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada. Penetapan program prioritas yang tertuang dalam RKPD 2021 berorientasi pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Perumusan RKPD merupakan proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun Rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan.

Selain dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta antara kabupaten dengan provinsi dan nasional. Demikian juga dengan dimasukkannya indikator kinerja utama pada SKPD yang kesemuanya itu berkaitan erat dengan penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah. Rancangan RKPD dan selanjutnya disepakati menjadi dokumen rancangan akhir RKPD di dalam Musrenbang RKPD. Lebih lanjut RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2021.

1.1.1 Proses Penyusunan RKPD

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyiapan Rancangan Awal RKPD

- a. Menyiapkan bahan masukan bagi penyusunan rancangan awal RKPD yang bersumber dari :
 - Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
 - Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021;
 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
 - Capaian kinerja tahun lalu dan tahun berjalan dari hasil monitoring dan evaluasi;
 - Prakiraan anggaran tahun rencana dari APBD tahun berjalan.
- b. Merumuskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan serta rencana kerja setiap prioritas untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang direncanakan;
- c. Merumuskan indikasi program/kegiatan;
- d. Pra Musrenbang Kabupaten untuk sinkronisasi usulan wilayah dan SKPD

2. Penyusunan Rancangan RKPD

- a. Menerima secara resmi naskah rancangan Renja SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD;
- b. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja SKPD terhadap tugas dan fungsi SKPD;
- c. Mengintegrasikan rancangan Renja SKPD ke dalam rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
- d. Menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
- e. Melakukan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
- f. Musrenbang untuk menyempurnakan rancangan RKPD.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

- a. Menyusun rancangan akhir RKPD dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang;
- b. Penyusunan rancangan akhir RKPD dengan memperhatikan naskah RKP Nasional dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya tentang kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Menyusun naskah rancangan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.

4. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD

- a. Kepala Daerah menerima secara resmi naskah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dari Kepala Bappeda;
- b. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD;

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum diselenggarakannya penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara, Penyusunan, engendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021;

1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai sebuah dokumen arahan, RKPD tidak berdiri sendiri namun merupakan dokumen yang memiliki keterpaduan dengan dokumen-dokumen perencanaan

pembangunan daerah lainnya. Hubungan antara RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kelima RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. RKPD Tahun 2021 merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021, dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2021.
3. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
4. Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Lombok Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Lombok Tengah ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. **Latar Belakang**, memuat pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2021 dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan

proses penyusunan RAPBD.

- 1.2. **Dasar Hukum Penyusunan**, menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.
- 1.3. **Hubungan Antar Dokumen**, menggambarkan Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
- 1.4. **Maksud dan Tujuan**, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2021 dan hubungannya dengan dokumen RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 1.5. **Sistematika RKPD**, mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan peraturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.

Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. **Kondisi Umum Kondisi Daerah**, mengemukakan tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2.2. **Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**, menguraikan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- 2.3. **Permasalahan Pembangunan Daerah**, mengemukakan permasalahan yang termuat dalam RPJMD dengan kondisi aktual Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan hasil musrenbang Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten. Dalam rangka sinergitas, sinkronisasi, dan integritas, juga menguraikan keterkaitan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan skala provinsi dan nasional.

Bab III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. **Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**, memuat penjelasan tentang

kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sumbangan sektoral, dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi lainnya serta tantangan perekonomian daerah tahun 2021.

- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah,** menjelaskan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan,** memuat penjelasan tentang hubungan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 tahun yang diambil dari dokumen RPJMD.
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021,** menjelaskan tentang prioritas pembangunan tahun 2021 yang dikaitkan dengan prioritas nasional dan provinsi dan pengalokasian pagu indikatif berdasarkan prioritas pembangunan.

Bab V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Bab VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan catatan-catatan untuk lebih bersungguh sungguh dalam melaksanakan seluruh agenda pembangunan tahun 2021.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021, dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD tahun 2021 dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah, serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b. Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pada kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD;
- c. Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- d. Sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

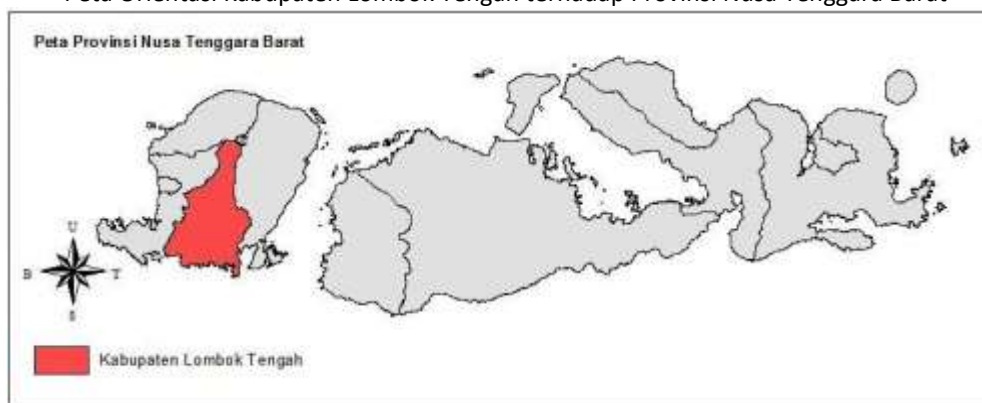
2.1.1.1. Aspek Geografi

a. Letak, Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Lombok Tengah dengan Kota Praya sebagai pusat pemerintahannya merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Posisinya terletak di antara 116°05' sampai 116°24' Bujur Timur dan 8°24' sampai 8°57' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.208,39 km² (120.839 ha). Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, di sebelah selatan terbentang Samudera Indonesia, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan di sebelah timur dengan Kabupaten Lombok Timur.

Gambar 2.1.

Peta Orientasi Kabupaten Lombok Tengah terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber : Statistik dan Spasial Kab. Lombok Tengah, 2015

b. Topografi

Dilihat dari topografi bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi dan merupakan areal kaki Gunung Rinjani. Curah hujan pada daerah ini relatif tinggi dan dapat menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian, juga terdapat aset wisata terutama pariwisata alam pegunungan dengan pemandangan ang indah dan udara yang sejuk. Bagian tengah merupakan wilayah dataran rendah dengan potensi pertanian dan perkebunan utamanya padi, palawija dan tembakau. Potensi ini didukung oleh hamparan lahan persawahan yang luas dan sarana irigasi yang memadai. Sedangkan bagian selatan selain terdapat hamparan persawahan juga terdapat daerah yang berbukit-bukit dan hamparan garis pantai sepanjang 85 kilometer.

c. Klimatologi

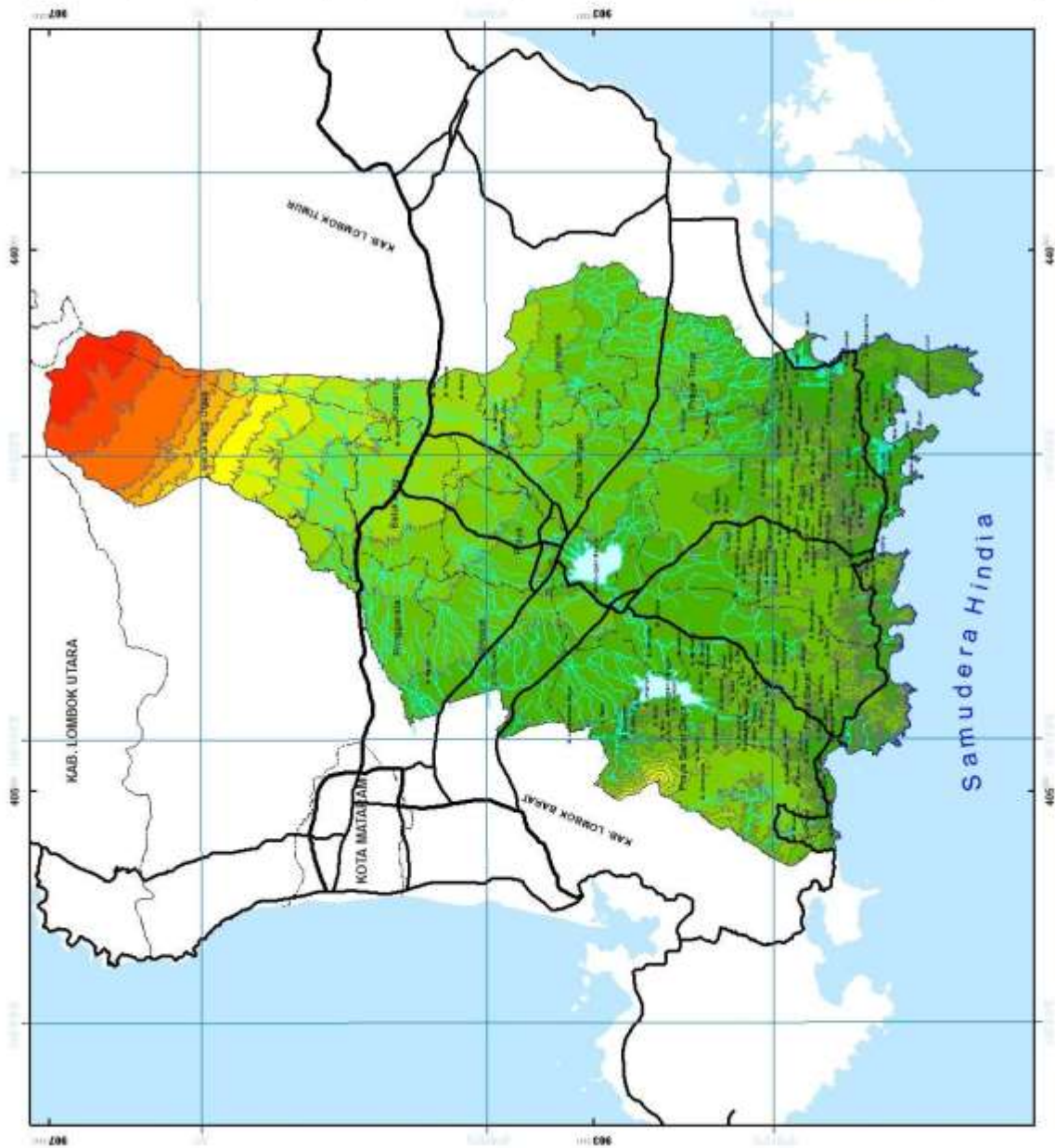
Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim tropis dengan musim kemarau yang kering pada bulan April-Oktober. Musim hujan mulai sekitar bulan Oktober/November sampai dengan bulan April dengan curah hujan pada bulan-bulan tersebut rata-rata di atas 100 mm, dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yang mencapai 375 mm. Sedangkan pada bulan Mei sampai September curah hujan rata-rata di bawah 100 mm bahkan di bawah 50 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan

Agustus yakni sebesar 0,58 mm. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari 18,16 hari dan hari hujan terkecil pada bulan Agustus selama 0,58 hari. Untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk keperluan air bersih maupun keperluan pertanian banyak terdapat sumber mata air di wilayah bagian Utara dengan cadangan debit air seluruhnya diperkirakan sekitar 5.162 liter per detik.

d. Geologi

Secara umum kondisi geologi di kawasan perencanaan digambarkan melalui kondisi geologi dan tektonik daerah Kabupaten Lombok Tengah. Kondisi geologi Kabupaten Lombok Tengah tidak terlepas dari kondisi geologi regional Pulau Lombok. Fisiografi Pulau Lombok termasuk ke dalam Busur Bergunungapi. Nusa Tenggara yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan Busur Banda dalam gunung api sebelah barat. Struktur yang terdapat di Pulau Lombok berupa sesar normal dan sesar geser jurus, yang umumnya berarah barat laut – tenggara. Gejala tektonika yang paling tua di daerah ini diduga terjadi pada Oligosen dengan diikuti oleh kegiatan gunung api bawah laut, bersusunan andesit-basal yang menghasilkan sedimen gunung api Formasi Pengulung dan Formasi Kawangan.

Pada Miosen Akhir dalam kondisi cekungan memungkinkan terbentuknya endapan batugamping Formasi Ekas, pada lingkungan laut dalam terbuka. Pada akhir tersier atau awal kuartar terjadi kegiatan tektonika yang menyebabkan timbulnya sesar geser dan sesar normal. Pada Pliosen sampai awal Plistosen terjadi kegiatan gunung api dari kelompok Gunungapi Lombok yang membentuk Formasi Kalipalung dengan Anggota Selayar, Formasi Kalibabak dan Formasi Lekopiko, Sejak Plistosen hingga Resen terjadi kegiatan gunung api yang menghasilkan batuan gunung api tak terpisahkan yang bersumber dari Gunung Rinjani, Gunung Pusuk, Gunung Nangi. Berdasarkan sejarah pembentukan geologi, Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasiran dan endapan lahar. Materi tersusun dari material lepas berukuran pasir hingga bongkah. Hal ini mengakibatkan kondisi tanah di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh jenis Komplek Mediteran Coklat, Gromosol Kelabu, Regosol Coklat dan Litosol.



**PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2016**

PETA TOPOGRAFI

SKALA: 1:25.000

DAERAH LOMBOK

Legenda

Keterangan Administrasi

- Ibu kota kabupaten
- batas kabupaten
- batas kecamatan
- ▭ garis pantai
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Perairan

- sungai
- bendungan/waduk

Topografi:

- Gunung/Gak

Ketinggian (m dpl):

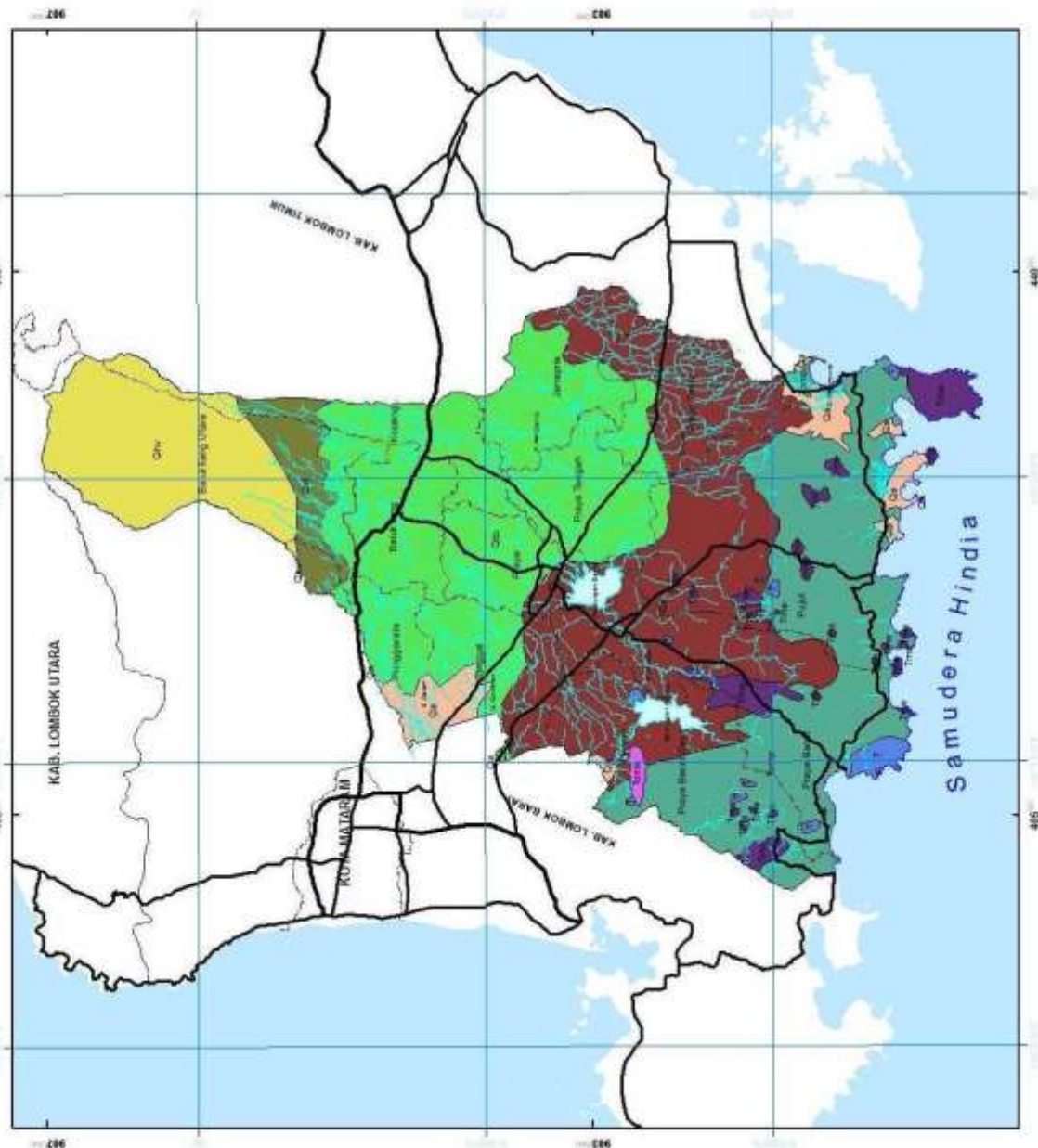
0-50	50-100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-600	600-700	700-800	800-900	900-1000	1000-1500	1500-2000	2000-2500	>2500
------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------	-----------	-----------	-------





Sumber:

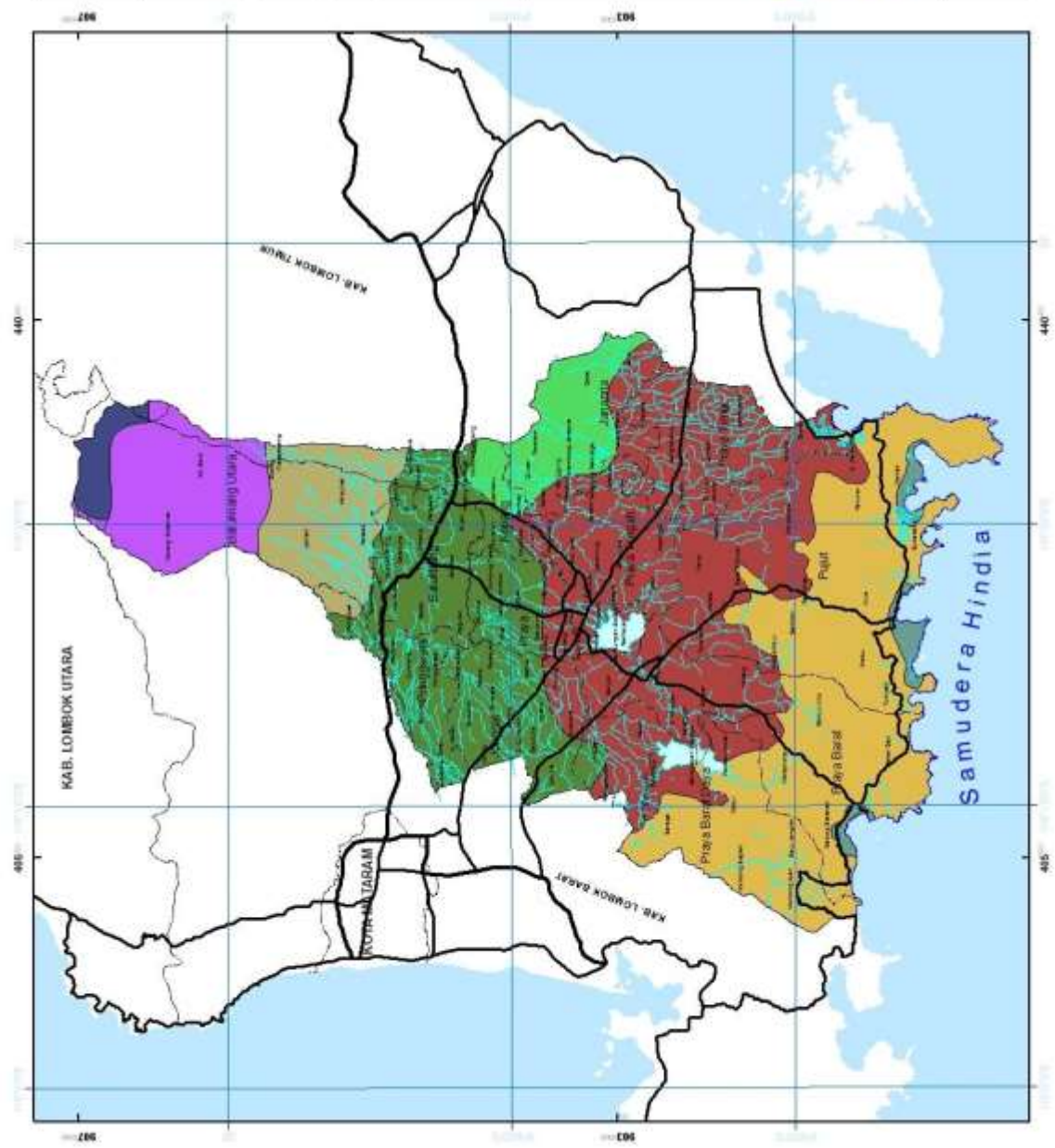
1. Peta Rupa bumi Basecontouring skala 1:25.000 tahun 2006
2. Analisis tahun 2010




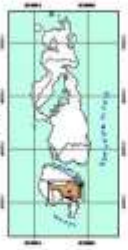













NO. PETA

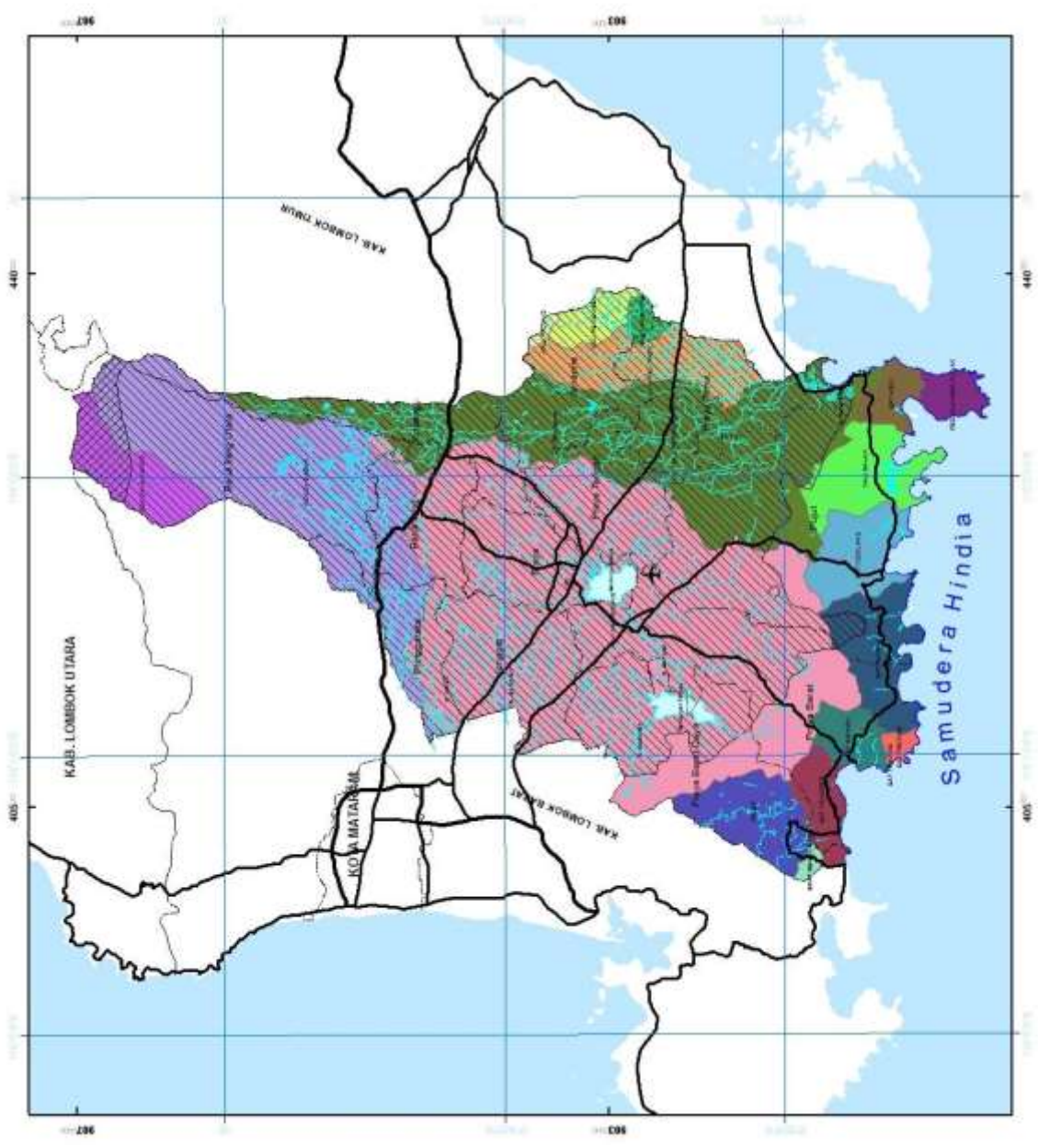
1-5




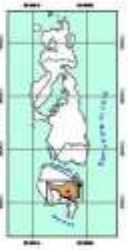






<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH</p> 	
<p align="center">RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016</p>	
<p align="center">PETA GEOLOGI</p>	
	<p>SKALA: 1:200.000</p> 
<p>Proyeksi: Transverse Mercator Datum: WGS 1984 Sistem Koordinat: UTM Zona: 48N</p>	
 <p align="center">DAERAH LOMBOK</p>	
<p>Keterangan</p> <p>Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> □ ibukota kabupaten — batas kabupaten — batas kecamatan ▤ garis pantai — Jalan Arteri — Jalan Kolektor 	<p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — sungai — bendungan/waduk
<p>Geologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Alluvium dan endapan pantai □ Pasir gunung api dan lava □ Formasi Kambek □ Formasi Surojale □ Satuan intrusi □ Formasi Kalsang □ Formasi Pangs Lombok □ Formasi Sumpang □ Formasi Pungung 	
<p>Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peta Raster Bumi Selsis utralral skala 1:25.000 tahun 2000 Peta Geologi skala 1:250.000 tahun 1980 Citra Satelit Landsat tahun 2010 	
<p align="right">NO. PETA 2 - 5</p>	



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH		
		
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016		
PETA JENIS TANAH		
	SKALA 1:250.000 	
Disusun oleh: Tim Kerja Mandiri, Jember, Tim Kerja Mandiri Tahun 2015		
		
Keterangan Administrasi • Ibu kota kabupaten — batas kabupaten — batas kecamatan  garis pantai  Jalan Arteri  Jalan Kolektor	Perairan  sungai  bendungan/waduk	
Jenis Tanah  Aerasi Coklat  Brown Pasau Sial  Dangkal Kuning-Tan  Komplek Gunungsi Keku-Tua Mekar-Colek Kemerahan  Komplek Regasi Keku dan Uluasi  Komplek Mekar dan Colek, Gunungsi Keku, Regasi Colek  Regasi Colek  Regasi Keku		
Sumber: 1. Peta R. Kabupaten Lombok Tengah Skala 1:250.000 tahun 2006 2. Peta Tematik Kabupaten Lombok Tengah 2009		NO. PETA 3 - 5



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH	
	
REKAMAJA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016	
PETA HIDROLOGI	
	SKALA: 1:200.000 
Proyek: Tanah dan Perencanaan Wilayah dan Kota Disusun Oleh: AGUS HADI SAMA, S.T.M.S.	
	
Keterangan Administrasi ● Ibu kota kabupaten — batas kabupaten — batas kecamatan □ garis pantai — Jalan Arteri — Jalan Kolektor	Perairan  sungai  bendungan/waduk
Hidrologi DAS ■ DAS 01 ■ DAS 02 ■ DAS 03 ■ DAS 04 ■ DAS 05 ■ DAS 06 ■ DAS 07 ■ DAS 08 ■ DAS 09 ■ DAS 10 ■ DAS 11 ■ DAS 12 ■ DAS 13 ■ DAS 14 ■ DAS 15 ■ DAS 16 ■ DAS 17 ■ DAS 18 ■ DAS 19 ■ DAS 20	
Cadangan Air Tanah  CAT BUKAN BERSELONG  CAT TALLUNG-BERSELONG	
Sumber: 1. Data Kabupaten Lombok Tengah 2. Data BPS Kabupaten Lombok Tengah 3. Data Laga Kabupaten Lombok Tengah 4. Data Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) 5. Data Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)	
NO. PETA 4-5	

Tabel 2.1.

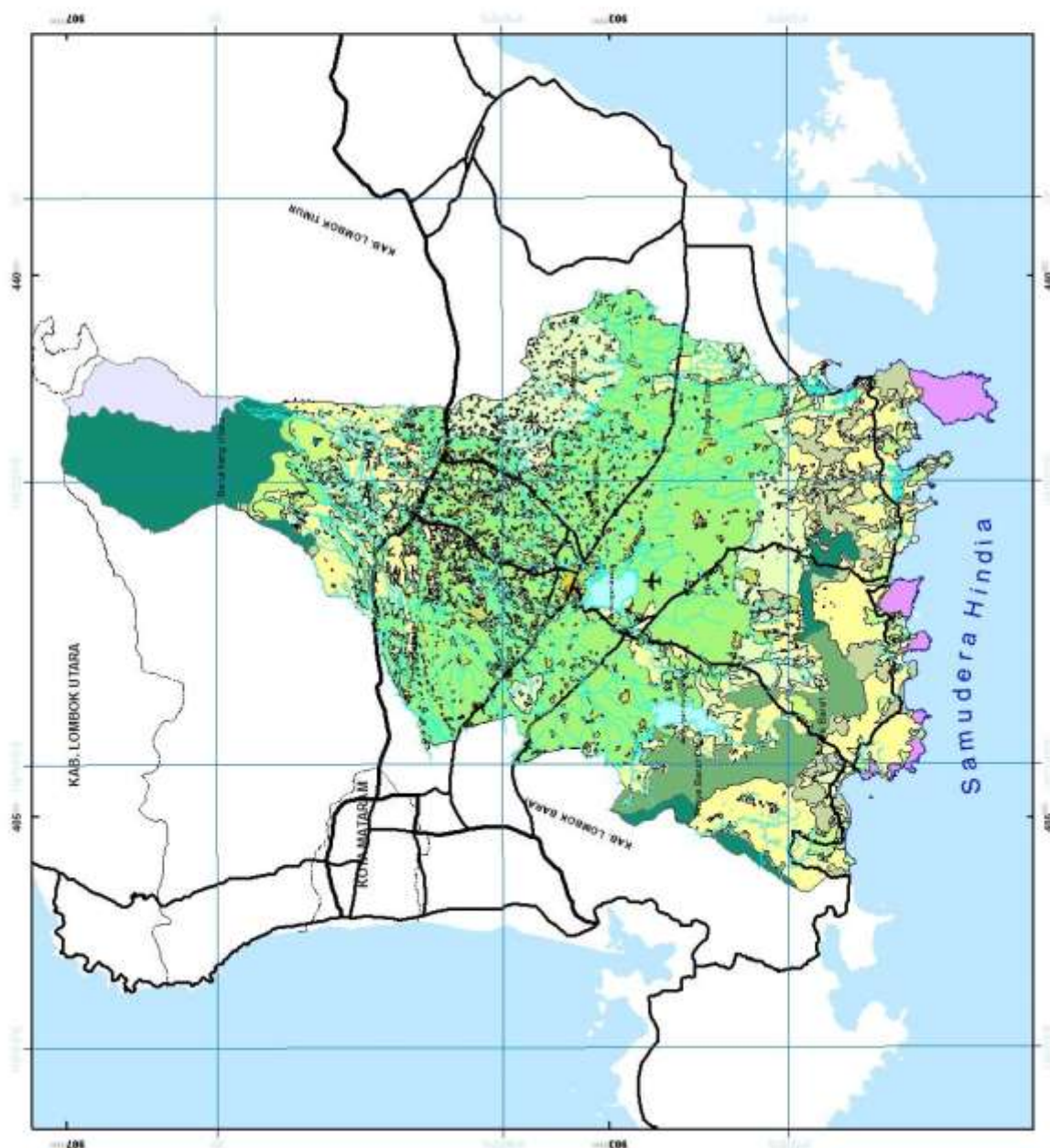
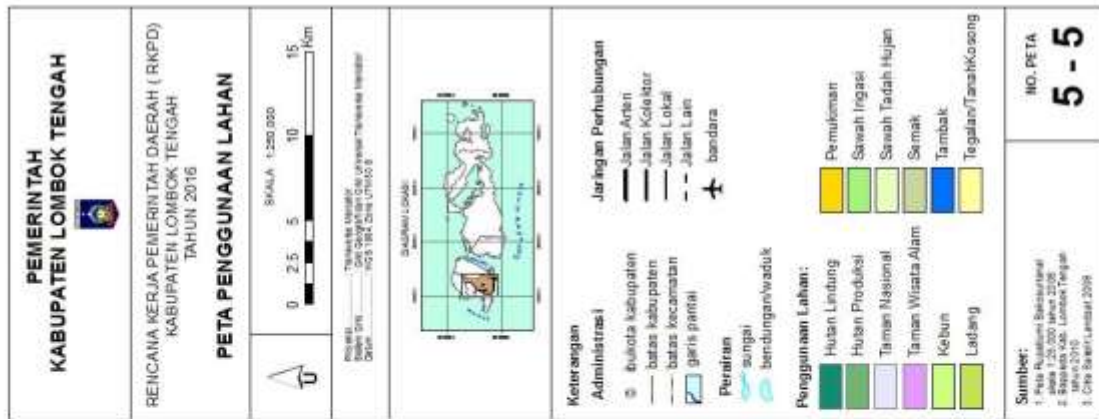
Luas Wilayah menurut Jenis Tanah di Kabupaten Lombok Tengah

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Aluvial	2.4	2.0
2	Regosol Kelabu	26.416	21.9
3	Regosol Coklat	7.222	6.0
4	Brown Fosrets Soil	9.15	7.6
5	Gromosol Kelabu Tua	30.771	25.5
6	Komplek Gromosol Kelabu Tua, Mediteran Coklat Litosol	6.494	5.4
7	Komplek Mediteran Coklat, Gromosol Kelabu, Regosol Coklat dan Litosol	38.372	31.8
	Jumlah	120.839	100.0

*Sumber : Statistik dan Spasial Kab. Lombok Tengah, 2016***e. Hidrologi**

Jika dikaji dari karakteristik air permukaannya, Kabupaten Lombok Tengah berada dalam wilayah SSWS (Sub Satuan Wilayah Sungai) atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Dodokan. Sebagian besar sungai terutama yang terletak di bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah hanya berair pada musim hujan saja. Adapun air permukaan lain yang dimanfaatkan masyarakat adalah bendungan atau waduk serta embung yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

Terdapat dua bendungan besar yaitu Bendungan Batujai dan Bendungan Pengga memiliki peran penting bagi masyarakat kabupaten Lombok Tengah secara umum. Bendungan Batujai ini selain berfungsi sebagai penampungan air, banyak dari masyarakat yang memanfaatkannya sebagai tempat sumber pendapatan masyarakat di sektor perikanan air tawar dan sebagai tempat wisata. Sedangkan sebaran air tanah di Kabupaten Lombok Tengah dapat ditemukan hampir di setiap wilayah namun sumber mata air terdapat di bagian utara dengan cadangan debit air seluruhnya sekitar 2.637 liter/detik.



f. Tata Guna Lahan

Evaluasi lahan adalah proses penilaian potensi lahan untuk penggunaan tertentu baik untuk pertanian maupun non pertanian. Evaluasi lahan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi dan merupakan areal kaki gunung Rinjani yang meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, Pringgarata dan sebagian Kecamatan Jonggat. Curah hujan pada daerah ini relatif tinggi dan dapat menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain itu di bagian utara terdapat aset pariwisata terutama pariwisata alam pegunungan dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk.
- b. Bagian tengah meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki potensi pertanian padi dan palawija, didukung oleh hamparan lahan sawah yang luas dengan sarana irigasi yang memadai.
- c. Bagian selatan merupakan daerah yang berbukit-bukit dan sekaligus berbatasan dengan Samudra Indonesia. Bagian selatan ini meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Karena berbatasan dengan Samudra Indonesia, maka wilayah ini memendam potensi wisata pantai yang indah dengan gelombang yang cukup fantastik.

2.1.1.2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan yang terkendali dan terencana akan mampu mengarahkan pembangunan menjadi lebih baik. Jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah selalu meningkat selama lima tahun terakhir. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2014 sebanyak 903.432 jiwa. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 955.400 jiwa dengan persentase pertumbuhan sebesar 0,93 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Jika dirata-ratakan, maka setiap tahunnya penduduk Kabupaten Lombok Tengah tumbuh sekitar 1,35 persen per tahun.

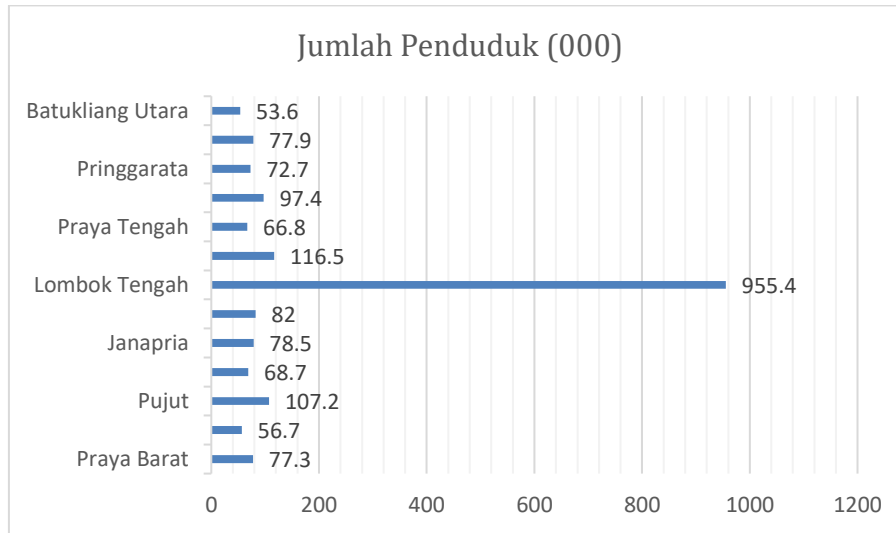
Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014-2019

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	903.432	912.879	922.088	930.797	939.409	955.400
Pertumbuhan Penduduk (%)	2,47	1,05	1,01	0,94	0,93	1,7
Rasio Jenis Kelamin	89,68	89,77	89,76	89,76	89,81	90,00

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah

Komposisi jumlah penduduk per kecamatan sampai dengan tahun 2019, disajikan sebagai berikut:

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Per Kecamatan 2019



Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta/dihasilkan disuatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut.

PDRB Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai 17,88 triliun rupiah, meningkat sebesar 6,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan terjadinya peningkatan volume produksi sekaligus perubahan harga barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 12,40 triliun rupiah, meningkat 4,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.3
PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010
Tahun 2016-2019 (juta rupiah)

Tahun	Berlaku	Konstan 2010
(1)	(2)	(3)
2016	14.423.751,17	10.854.980,04
2017	15.789.214,15	11.551.693,67
2018*	16.750.495,68	11.918.408,40
2019**	17.881.010,00	12.403.660,00

* angka sementara

** angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2019, perekonomian Kabupaten Lombok Tengah

mengalami peningkatan sebesar 4,01 persen. Hal ini karena meningkatnya produksi pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik gas dan konstruksi yang didorong oleh adanya investasi terutama investasi pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur pengembangan kawasan KEK Mandalika.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori Tahun 2016-2019 (persen)

Kategori		2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,86	6,37	2,31	1,69
B	Pertambangan dan Penggalian	9,36	7,12	5,86	12,83
C	Industri Pengolahan	3,19	4,69	1,47	3,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,85	5,39	1,14	9,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,72	3,95	1,18	-0,97
F	Konstruksi	8,68	7,03	5,49	14,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,12	7,93	5,73	6,31
H	Transportasi dan Pergudangan	5,74	6,23	-1	-5,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,54	7,01	2,33	2,6
J	Informasi dan Komunikasi	8,62	8,02	5,34	4,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,11	10,48	6,87	1,49
L	Real Estat	6,54	6,81	5,04	4,98
M,N	Jasa Perusahaan	6,72	5,34	5,28	5,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,31	2,56	0,77	3,43
P	Jasa Pendidikan	6,01	5,62	5,68	7,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,78	6,02	7,89	6,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,25	6,81	5,38	5,51
PDRB		5,65	6,42	3,17	4,07

* angka sementara

** angka sangat sementara

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat peranan suatu kategori terhadap total perekonomian Kabupaten Lombok Tengah adalah sumber pertumbuhan (source of growth). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.5
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 (persen)

Kategori		2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,76	1,66	0,58	0,43
B	Pertambangan dan Penggalian	0,39	0,31	0,21	0,57

Kategori		2016	2017	2018*	2019**
C	Industri Pengolahan	0,19	0,26	0,08	0,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,00	0,00	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,00	0,00
F	Konstruksi	1,07	0,90	0,62	1,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,87	0,87	0,62	0,72
H	Transportasi dan Pergudangan	0,99	1,06	(0,02)	(0,92)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,10	0,08	0,02	0,03
J	Informasi dan Komunikasi	0,15	0,14	0,09	0,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,21	0,21	0,14	0,03
L	Real Estat	0,22	0,23	0,17	0,17
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,12	0,13	0,09	0,17
P	Jasa Pendidikan	0,26	0,25	0,23	0,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,15	0,20	0,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,14	0,16	0,12	0,13
PDRB		5,65	6,42	3,17	4,07

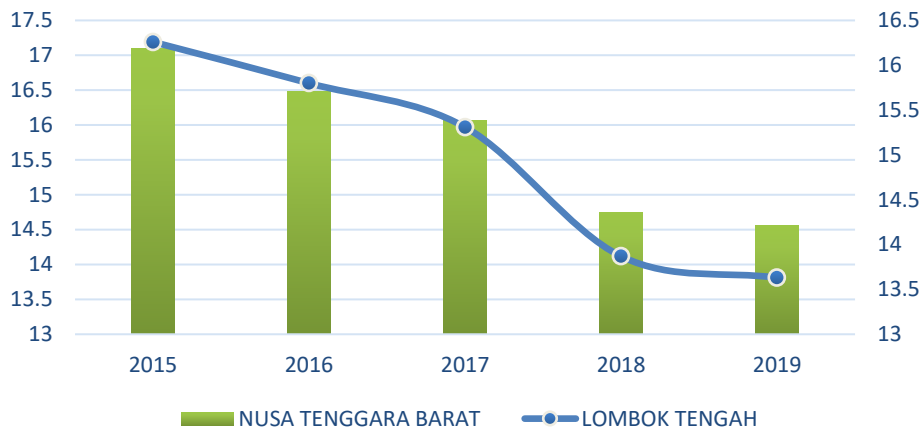
* angka sementara

** angka sangat sementara

Pada tabel 2.5 di atas dapat dilihat sumber pertumbuhan Lombok Tengah terbesar dari konstruksi sebesar 1,95 persen diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang juga menyumbang pertumbuhan 0,72 persen. Untuk lebih meningkatkan perekonomian Lombok Tengah, pemerintah dapat mengembangkan kedua kategori tersebut dengan melakukan inovasi dalam kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari setiap kategori tersebut. Selain itu, kelestarian lingkungan juga harus tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan masalah baru dalam pengembangan sektor ekonomi.

Analisis tren kemiskinan selama kurun waktu 2010-2019 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perubahan kemiskinan. Selama kurun waktu tersebut kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 19,92 persen, dan pada tahun 2019 terus mengalami penurunan hingga mencapai 13,63 persen. Penurunan tingkat kemiskinan ini merupakan peran serta semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.

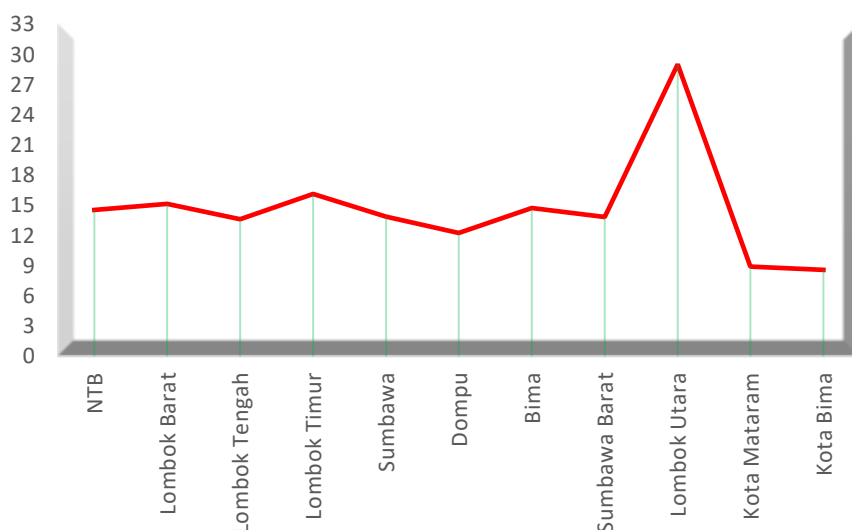
Grafik 2.2
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010-2019



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah berada pada peringkat ke-4 terendah dan persentasenya lebih rendah dari persentase penduduk miskin Provinsi NTB. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-pulau Lombok, peringkat Kabupaten Lombok Tengah berada pada posisi ke-2 terendah setelah Kota Mataram.

Grafik 2.3
Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019



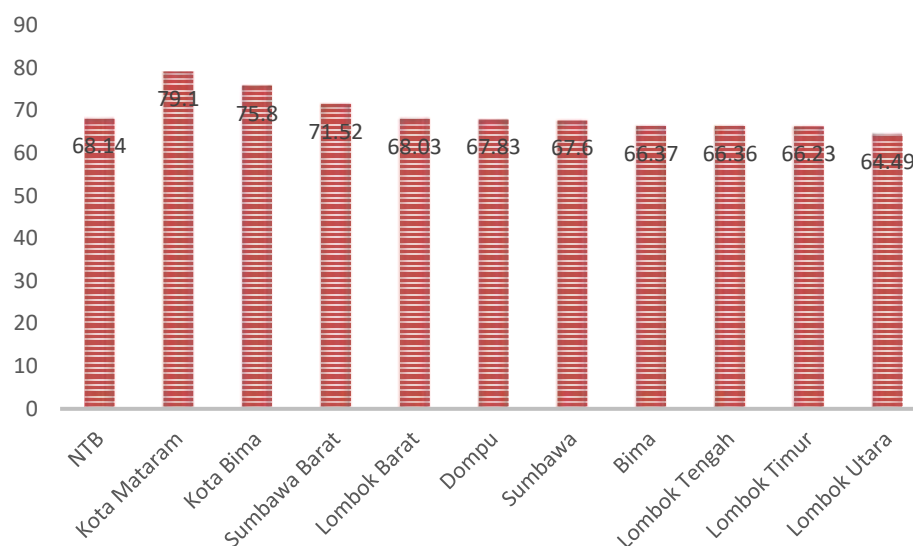
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil penghitungan, IPM Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 sebesar 66,36. Dengan tingkat IPM tersebut, Kabupaten Lombok Tengah masih

menyandang predikat “sedang” dalam pembangunan manusia. Posisi IPM Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 berada di posisi ke-8 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Setiap tahun, IPM Lombok Tengah meningkat rata-rata 1,40 persen selama periode 2014-2019. Dalam kurun waktu enam tahun terjadi kenaikan IPM hingga 4,48 poin. Pada tahun 2019, IPM Lombok Tengah mencapai 66,36, meningkat 1 poin dibanding tahun sebelumnya. Hal ini berarti IPM Lombok Tengah tumbuh 3,10 persen pada periode 2017-2019.

Grafik 2.4
IPM Kabupaten/Kota Provinsi NTB 2019



Untuk mempercepat peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Tengah diperlukan modal, investasi, dan semangat yang besar dari masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik. Investasi bukan hanya dalam bentuk pengembangan usaha yang tujuannya untuk mendapatkan nilai tambah dari usaha tersebut, tapi investasi bisa melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya bisa membangun daerahnya. Dengan sumber daya berkualitas dapat menggerakkan dan mempercepat roda perekonomian.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

a) Pendidikan

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang memadai, Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai, Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, Terwujudnya pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan, Terwujudnya tata kelola penyelenggara layanan pendidikan yang baik, Terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara, Terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas, Terwujudnya pendidikan inklusi yang berkualitas, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
PAUD terakreditasi	%	2,51	6,92	6,92	3,39	42,32

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Capaian SPM sarana dan prasarana pendidikan dasar	%	83,71	76,27	76,27	77,17	77,27
Capaian SPM mutu pendidik pendidikan dasar	%	80,71	78,31	78,31	79,63	82,31
Persentase melek huruf	%	78,74	80,94	80,94	89,34	89,87
Cakupan Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusi	%	83,3	43,27	85,77	44,97	89,33
Daya tampung lembaga pendidikan dan kursus	%	37	85,77	43,27	87,21	51,29
APK PAUD*	%	63,31	61,44	67,72	67,72	68,86
APK SD/MI/Paket A	%	114,21	112,28	116,81	106,19	112,5
APK SMP/MTs/Paket B	%	102,51	104,66	102,69	97,49	103,35
APM SD/MI/Paket A	%	99,94	97,35	99,97	98,11	99,99
APM SMP/MTs/Paket B	%	97,07	75,38	76,42	77,54	97,90
Jumlah penduduk buta huruf (15 tahun keatas)*	jiwa	80.752	80.736	70.032 jiwa	70.032 jiwa	57.702 jiwa

*) Realisasi 2018

b) Kesehatan

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tersedianya tenaga kesehatan yang profesional, Tersedianya fasilitas dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar, Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan memadai, Terwujudnya sistem layanan kesehatan yang baik, Terwujudnya metode promosi PHBS yang tepat, Terlayannya kesehatan gizi ibu dan anak secara tepat, Tertanganinya penyakit menular secara berkesinambungan, Terlayannya imunisasi secara berkelanjutan, Terselenggaranya jaminan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, Tersedianya fasilitas dan perbekalan kesehatan pendukung layanan rumah sakit, Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas tatakelola keuangan BLUD rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku, Terwujudnya pola produksi pangan yang baik pada industri rumah tangga pangan, Tersedianya sarana prasarana dan SOP untuk layanan kesehatan ibu, anak, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi	%	77,7	80,57	80,2	85	83
Rasio puskesmas terhadap penduduk	unit/penduduk	1:36.005	1:34.147	1:30.000	01:33.000	1:33.000
Jumlah fasilitas pelayanan primer terakreditasi	unit	0	0	12	23	28
Ketersediaan obat dan vaksin	%	70	90,2	84	91,23	93,46
Implementasi SPM pelayanan kesehatan primer	%	70	70	85	90	90
Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lombok Tengah	%	26,38	26,38	30,59	32,5	35
Cakupan desa siaga aktif	%	89,21	89,2	90,55	93	93

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Prevalensi status gizi masyarakat	%	17,83	21,3	20,5	17	13.66
Prevalensi Case Notification Rate (CNR) - Rata-rata penemuan penyakit menular TB dan HIV-AIDS	%	80,32	92	81	100	96
Cakupan penanganan KLB penyakit menular	%	100	100	100	100	100
Cakupan desa universal child immunization (UCI)- imunisasi keseluruhan bagi anak	%	100	98	100	98,87	89.29
Cakupan masyarakat Miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	100	97,25	100	100
Cakupan Layanan Penerbitan Surat Pengesahan Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan	%	25	40	40	41	40
Kasus Kematian Bayi	Kasus/ Tahun	199	173	209	233	177
Kasus Kematian Ibu	Kasus/ Tahun	16	25	29	24	28
Jumlah Desa Open Defecation Free (ODF) - Bebas Buang Air Besar Sembarangan	Desa	40	47	55	<u>67</u>	<u>73</u>
Cakupan penduduk dengan akses jamban	%	76,94	76,13	78,6	80,19	84.48
Jumlah Puskesmas BLUD	Unit	0	0	5	5	5
Capaian SPM RSUD	%	68	84.21	83	84,5	87,75
Akreditasi BLUD RSUD	Type	Type C	Type C	Type C	Type C	Type C

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tersedianya rencana rinci tata ruang yang memadai, Tersedianya jalan dalam kondisi yang mantap, Tersedianya sarana dan prasarana utilitas perkotaan, Tersedianya sarpras air bersih dan tersedianya saluran irigasi yang memadai, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Jumlah Persetujuan Substansi Rencana Rinci RTRW	Buah	0	1	0	1	1
Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang	Dokumen	4	5	6	7	8
jumlah dokumen tata ruang yang dipublikasikan	Dokumen	2	2	2	4	3
Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	64,55	64,55	65,71	70,62	66.32
Luas Layanan Daerah Irigasi Kabupaten (Ha)	Ha	49.517	49.517	50.806	49.517	49.517
Persentase Panjang Saluran irigasi Induk dan sekunder dalam kondisi baik	%	71,1	71,1	85,15	87,78	90
Debit air irigasi yang tersedia	Liter/dt	23.108	23.108	23.153	23.108	28.825
Bangunan gedung Kantor DPRD dan Kantor Bupati	Unit	0	0	1	1	2

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Cakupan layanan air bersih	%	67,5	67,5	74,6	76	83,33

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tersedianya PJU yang memadai, Tersedianya prasarana perumahan yang memadai dan Menurunnya luasan kawasan kumuh, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Jumlah kawasan strategis kabupaten yang memiliki PJU	Titik	2.688	2.688	6.089	3.866	4.105
Cakupan layanan utilitas perkotaan	%	64,55	64,55	57,6	55,13	79.16
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang terpujar	Unit	67.374	67.374	66.801	63.867	61.944
Luasan Kawasan kumuh perkotaan	Ha	110	110	93	69,43	58.15

e) Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tercegah terjadinya konflik sosial, tercegah semakin rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi, Terciptanya ketentraman, kenyamanan dan perlindungan masyarakat, Tersedianya aparatur kebencanaan yang kompeten, Tersedianya prasarana yang memadai, Tersedianya sarana yang memadai, Tersedianya sistem peringatan dini kebencanaan, Terwujudnya masyarakat tangguh bencana dan Tertanganinya korban bencana secara terpadu, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Angka kriminalitas	Kasus	293	137	214	237	295
Konflik horisontal yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
Pemilih aktif dalam pemilukada	%	53	-	-	70	67.99
Keahlian bidang kebencanaan yang dimiliki	%	30	48	62,24	67,47	69,88
Sarana dan prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	%	32	62	66,67	66,67	66,67
Ketersediaan sistem peringatan dini kebencanaan di daerah rawan bencana	%	0	0	20	28,33	40
Lembaga kebencanaan yang siap berkerjasama dalam penanggulangan bencana	%	75	80	90	90	100
Korban bencana yang mendapatkan bantuan	%	100	100	100	100	100

2.1.3.2. Fokus layanan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

a) Tenaga kerja

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja, Tersedianya lapangan pekerjaan baru dan terwujudnya perlindungan terhadap tenaga kerja dengan capaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Tingkat pengangguran terbuka	%	6,37	7,42	2,90	3,08	2,44

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tersedianya sumber daya manusia yang responsif gender, Tersedianya aturan tentang kesetaraan gender, Terwujudnya kelompok perempuan yang terampil dan mandiri Tersedianya lembaga pengarusutamaan gender yang profesional Terwujudnya Kabupaten Layak Anak, Tersedianya sarana prasarana yang memadai, Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, Terwujudnya masyarakat yang paham tentang perlindungan perempuan dan anak, Tersedianya aturan terkait perlindungan perempuan dan anak, dan Tersedianya lembaga perlindungan perempuan dan anak yang profesional dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terlapor yang tertangani	%	75	79	64	100	100
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang aktif	%	7,7	7,7	38,46	61,58	69.23
Kabupaten layak Anak	Status	Belum	Belum	Belum	belum	22/24 indikator tercapai

c) Pangan

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tersedianya cadangan pangan pemerintah yang memadai, Tersebaranya pangan yang merata, Terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Cadangan pangan pemerintah	Ton	23,3	45,3	45,3	34,7	60.20
Desa rawan pangan	Desa	0	0	0	0	0
Skor pola pangan harapan	Point	85,6	86	86,2	85,5	90.7

d) Pertanian

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
persentase ketersediaan tanah	%	100	100	100	100	100

untuk pembangunan infrastruktur						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

e) Lingkungan Hidup

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Terwujudnya masyarakat sadar lingkungan, Tercegah semakin menurunnya daya dukung lingkungan, Terwujudnya keamanan lingkungan strategis yang kondusif, Tersedianya data/informasi SDA dan LH yang valid, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Cakupan titik pantau kualitas air, udara dan media lingkungan lainnya	%	17,35	32	32	53	53,33
Cakupan wilayah sumber mata air yang terkonservasi	Ha	16,98	4	25	30	33
Cakupan data/ informasi SDA dan LH	dokumen	25	2	2	2	2
Indeks lingkungan hidup kabupaten	Point	NA	NA	48	58,66	52,12
Cakupan layanan persampahan	%	13	13	13	20,11	30,7

f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Tingkat kepemilikan KTP elektronik	%	65,12	70,96	76,93	89,52	91
Kepemilikan akta kelahiran	%	57,93	62,34	73,41	78,6	83,08
Kepemilikan kartu keluarga	%	73,23	69,69	78,10	86,15	87,18

g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Terwujudnya aparatur pemerintahan desa yang berkualitas, Terwujudnya kelembagaan desa yang berkualitas, Terwujudnya pembinaan lembaga ekonomi pedesaan yang intensif dan berkelanjutan, Terwujudnya pola pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pelaku pemberdayaan yang efektif dan berkesinambungan, Terwujudnya lembaga adat yang berperan aktif dalam masyarakat, Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Desa kurang berkembang menjadi desa berkembang	Desa	Na	20	9	9	9
Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	Na	7	14	14	27
Jumlah BUMDes aktif	Unit	30	40	53	89	89
Jumlah lembaga kemasyarakatan dan	Lembaga	NA	NA	5	19	26

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
kelompok pemberdayaan aktif	(kelompok)					
Jumlah lembaga adat desa aktif	Lembaga	1	2	6	11	5

h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tersedianya prasarana penunjang, Tersedianya sarana penunjang, Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, Terwujudnya masyarakat yang sadar tentang pentingnya Keluarga Berencana, Tersedianya modal usaha yang memadai, Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan pertama, Terwujudnya penurunan kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49) tahun, Tersedianya lembaga keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang efektif, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Rata-rata usia kawin pertama)*	Tahun	19,8	19,57	19,8	19,67	19,39
Pemahaman Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja	%	1,87	1,90	4,6	8,37	8.17
Rasio Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dengan Keluarga Sasaran BKB	%	78	78,2	78,6	84,27	84.69
Keluarga Pra Sejahtera	%	30	30	28,28	28,17	19
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,17	1,01	1,01	1,01	1.03

i) Perhubungan

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tersedianya fasilitas keselamatan jalan yang memadai dan Tersedianya layanan moda transportasi, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Persentase jalan kabupaten yang memiliki fasilitas keselamatan jalan	%	50	50	100	65	90.9
Jumlah terminal yang berfungsi	Terminal	0	0	0	1	1
Cakupan layanan trayek angkutan kawasan strategis yang terlayani	Trayek	8	8	10	10	10

j) Komunikasi dan Informatika

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tersedianya sistem komunikasi dan informatika yang memadai, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Cakupan layanan telekomunikasi (coverage area)	%	n.a	96,4	96,7	96,7	96.40

k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tersedianya SDM koperasi dan aparatur yang berkompeten, Tersedianya permodalan koperasi yang memadai, Tersedianya sarana prasarana koperasi yang memadai, Tersedianya SDM UMKM dan aparatur yang berkompeten, Tersedianya permodalan UMKM yang memadai, Dan Tersedianya sarana prasarana UMKM yang memadai, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Jumlah koperasi berkualitas	Unit	295	326	320	330	331
Jumlah koperasi baru	Unit	7	10	10	25	20
Jumlah Usaha Menengah	Unit	30	34	36	38	40
Jumlah usaha kecil	Unit	1.464	1.476	1.484	1.494	1512
Jumlah usaha mikro	Unit	155.477	155.997	157.224	156.979	157.482

l) Penanaman Modal

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara prima, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Nilai investasi PMDN	Milyar Rupiah	689,44	970,85	1.041,85	1.172,13	1.290,94
Nilai investasi PMA	Juta US Dolar	1.203,61	1.338,96	1.406,11	1.475,91	1.545,84
Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan	Point	76,74	77,84	76,77	78,75	75.50

m) Kepemudaan dan Olah Raga

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah tersedianya sarana prasarana yang memadai dan Terwujudnya sinergi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembinaan pemuda dan olahraga, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Jumlah atlet dan pemuda berprestasi yang dicapai pada tingkat regional, nasional dan internasional	Orang/ Tahun	11	11	21	25	38

n) Kebudayaan

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Terselenggaranya event pariwisata yang menarik dan berkelanjutan, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
-----------	--------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

		(2015)	2016	2017	2018	2019
Jumlah event kepariwisataan yang dilaksanakan	Event/ Tahun	2	5	12	9	5

o) Perpustakaan dan kearsipan

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai, Tersedianya tenaga pustakawan yang profesional dan Terwujudnya manajemen arsip yang berkualitas, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Rasio ketersediaan buku di perpustakaan daerah	%	59,67	59,67	67,57	61,3	93,3
Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah	Orang/tahun	20.445	20.445	27.260	24.706	33.758
Cakupan pelayanan arsip daerah	%	85	85	95	100	116

2.1.3.3. Fokus layanan urusan pilihan

a) Kelautan dan Perikanan

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tersedianya prasarana perikanan yang memadai, Tersedianya sarana perikanan dan pengolahan hasil perikanan yang memadai, Terwujudnya kawasan perikanan unggulan, dan Tersedianya pelaku usaha perikanan dan aparaturnya yang berkualitas, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Produksi Perikanan Budidaya:- Rumput Laut	Ton/ Tahun	88.723,00	71.093,05	67.012,34	38871,79	43.740,99
Ikan budidaya	Ton/ Tahun	4.558,63	30.588,57	31.581,74	34.472,46	31.3333,52
Kawasan perikanan unggulan	Kawasan	0	0	0	0	0
Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton/ Tahun	2.334	2.362	2.392,2	2.897	2375
Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton/ Tahun	4.084,03	4.165,70	3.639,30	39,43	4.414,36
Produksi garam rakyat	Ton/ Tahun	3.055	3.116	1.676,31	3.202	3.300

b) Pariwisata

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai, Terselenggaranya event pariwisata yang menarik dan berkelanjutan dan Terwujudnya pelaku wisata yang profesional, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
-----------	--------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (overnight visitor)	Orang/ Tahun	46.908	45.586	113.895	70.539	74.875
Jumlah kunjungan wisatawan domestik (overnight visitor)	Orang/ Tahun	53.820	50.086	86.473	83.176	61.700
Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	3,08	3,00	3,50	3	3,00
Jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang tersertifikasi	Orang	307	357	392	300	300

c) Pertanian

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Terwujudnya SDM petani dan aparatur pembina yang kompeten, Terpenuhinya sarana prasarana pertanian yang memadai, Tersedianya teknologi pertanian, Terwujudnya pelaku usaha perkebunan dan aparatur yang memadai, Tersedianya sarana dan prasarana perkebunan yang memadai, Tersedianya teknologi perkebunan, Tersedianya kawasan perkebunan yang menjadi obyek wisata, Tersedianya sarana dan prasarana peternakan yang memadai, Terwujudnya pelaku usaha peternakan dan aparatur yang memadai dan Tersedianya teknologi peternakan, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura: - Padi	Ton/ Tahun	466.096	479.772	479.772	518.764	502.639.00
- Jagung	Ton/ Tahun	39.322	23.189	50.706	95.940	70.450.00
- Kedelai	Ton/ Tahun	36.661	32.708	26.219	24.916	16.321.00
- Melon	Kw/ Tahun	11.220	6.770	11.394	9085	26.374.00
- Tembakau virginia	Ton/ Tahun	14.190	12.576,61	18.641	19.275,23	20.798.00
- Tembakau rajangan	Ton/ Tahun	421,50	1.274,5	1.006	1.040,60	924.38
- Kelapa	Ton/ Tahun	9.983	7.059,25	6.561,49	369,36	8.131.57
- Kopi	Ton/ Tahun	399	434,1	357,2	369,4	539.97
- Jambu Mete	Ton/ Tahun	908	917,95	595,63	878,06	861.44
- Kakao	Ton/ Tahun	149	182,89	61,22	45,34	45.52
Kawasan pertanian/perkebunan unggulan	Kawasan	0	0	6	1	2
Produksi hasil peternakan:- Sapi	Ekor	162.250	164.921	168.220	173939	176.992.00
- Kambing	Ekor	102.315	109.589	111.245	115779	116.464.00
- Ayam Buras	Ekor	1.204.138	2.879.456	2.951.444	3022279	3.205.454.00
- Itik	Ekor	714.349	712.772	594.254	769258	765.463.00
Jumlah ternak (sapi, kerbau, kambing, kuda) terjual	ekor/ tahun	4.833	6.809	5.799	5848	8.317.00
Penyuluh yang Dilatih	Orang	10	63	79	29	39
Jumlah Kelompok Tani Madya	Kelompok	273	286	455	473	313

d) Perdagangan

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tersedianya prasarana perdagangan yang memenuhi standar, Tersedianya sarana perdagangan yang sesuai standar, Tersedianya SDM perdagangan yang kompeten, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Jumlah pasar yang baik	Unit	5	5	7	13	19
Jumlah kawasan PKL yang tertata	Kawasan	4	5	6	7	11
Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	unit/ tahun	2.000	2.134	2.549	1.927	4909
Nilai ekspor	Juta rupiah/ Tahun	2.239,80	2.500	2.398,95	-	6.762

e) Perindustrian

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah Tersedianya sarana prasarana IKM yang memadai, Tersedianya SDM industri kecil menengah dan aparatur kompeten, Tersedianya permodalan IKM yang memadai dan Tersedianya kawasan industri kecil menengah yang menjadi tujuan wisata, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Jumlah fasilitasi HKI bagi IKM	Unit	11	17	46	29	39
IKM yang difasilitasi PIRT	Unit	115	170	170	239	265
Jumlah IKM yang menerapkan GKM (Gugus Kendali Mutu)	Unit	30	34	36	37	42
Kawasan wisata industri kecil menengah	Kawasan	2	2	2	3	3

f) Transmigrasi

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah tersedianya kawasan transmigrasi, tersedianya sarana prasarana pendukung, terwujudnya transmigran yang terampil dan mandiri, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Jumlah keluarga transmigrasi yang dibina	KK	97	117	209	284	286

2.1.3.4. Fokus layanan urusan fungsi penunjang

a) Administrasi pemerintahan

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan fungsi penunjang ini adalah Terwujudnya pola pemberdayaan tokoh agama yang tepat, Terwujudnya lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berkualitas, Terbinanya pengurus rumah

ibadah secara berkelanjutan, Terwujudnya rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, Tertatanya administrasi perkantoran, Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, terwujudnya perumusan kebijakan dan pengendalian kebijakan kepala daerah secara komprehensif, Terwujudnya peningkatan koordinasi pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Terwujudnya akses publik terhadap informasi pembangunan dan Terwujudnya pelayanan publik kecamatan yang berkualitas, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Level Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah	Level	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
Rekomendasi hasil temuan yang ditindaklanjuti	&	80	89,47	88%	96	94,8
Maturitas SPIP	Level	Level 1	Level 2	Level 3	level 3	Level 3
Nilai kinerja pemda	Nilai Lakip/ LKJIP	CC	CC	B	C	C
Persentase Koordinasi	%	100	100	100	100	100
Jumlah aparatur mengikuti diklat dalam jabatan	%	55,25	56,85	45,61	48,8	68
Cakupan layanan kepegawaian	%	100	79,46	79,46	100	100
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100
Intensitas penyebarluasan informasi	Kali/ Tahun	12	12	12	12	12
Cakupan layanan administrasi kecamatan	%	100	100	100	100	100
Cakupan layanan administratif pada anggota DPRD	%	100	100	100	100	100

b) Perencanaan, penelitian dan pengembangan

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan fungsi penunjang ini adalah Terwujudnya metode perencanaan daerah yang komprehensif dan partisipatif, Terwujudnya penyediaan data yang valid dan berkualitas, Terwujudnya kerjasama pembangunan yang sinergis, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Ketersediaan Data yang Valid dan Berkualitas	Jenis Data	8	8	8	8	9
Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan	%	100	100	100	100	100
Kerjasama Pembangunan yang Difasilitasi	Buah	2	2	3	4	3
Jumlah Kerjasama Inovasi	Buah	1	8	3	4	5

c) Keuangan

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan fungsi penunjang ini adalah Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal dan Terwujudnya kapasitas

keuangan daerah yang memadai, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Realisasi PAD	Rupiah	156.931.857.546	144.575.899.322	236.879.971.508,65	187.610.473.774,49	159.318.063.590.75
Rasio Sarana Prasarana Pemerintah Daerah yang Laik Pakai	%	95	95	95	78	79.5

d) Kepegawaian dan diklat

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan fungsi penunjang ini adalah Terwujudnya manajemen Apartur Sipil Negara dan Tersedianya aparatur yang berkompeten, dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut.

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Cakupan layanan kepegawaian	%	100	79,46	79,46	100	100
Jumlah aparatur mengikuti diklat dalam jabatan	%	55,25	56,85	45,61	48,8	68

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah antara lain dapat dilihat dari nilai investasi, baik nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) serta besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Indikator	Satuan	Baseline (2015)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Nilai investasi PMDN	Milyar Rupiah	689,44	970,85	1.041,85	1.172,13	1.290,94
Nilai investasi PMA	Juta US Dolar	1.203,61	1.338,96	1.406,11	1.475,91	1.545,84
Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan	Point	76,74	77,84	76,77	78,75	75.50

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD

Analisis dilakukan terhadap capaian pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 yang mencakup hasil keseluruhan SKPD yang menyampaikan laporan meliputi: (1) Realisasi Anggaran, dan (2) Realisasi Capaian Kinerja SKPD.

Selanjutnya untuk perhitungannya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung besaran realisasi anggaran dengan satuan % (persen)
2. Menghitung realisasi tertimbang yang sekaligus menggambarkan kapasitas pelaksanaan kegiatan atau kemampuan untuk melaksanakan dan atau

menyelesaikan kegiatan. Penghitungan ini dilakukan dengan membagi besaran realisasi dengan total anggaran dan dikalikan 100.

3. Mengkategorikan realisasi anggaran dan capaian target kinerja tahunan menjadi 5 (lima) kategori sebagaimana dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pada table T-E.1 yaitu sebagai berikut.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja ini dilakukan dengan memanfaatkan laporan Triwulan IV tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dilengkapi dengan konfirmasi lapangan. Evaluasi atas hasil Renja SKPD kabupaten dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD kabupaten/kota. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi dapat memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD kabupaten/kota serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Berdasarkan capaian kinerja yang diraih oleh SKPD dalam memenuhi target indikator berbasis output tahun 2019, di Triwulan IV ini dapat diketahui dari 44 SKPD yang ada di Kabupaten Lombok Tengah terdapat 43 SKPD yang berhasil mencapai

predikat capaian kinerja “**Sangat Tinggi**” karena lebih dari 90% indikator keluaran yang dimiliki telah mendekati target yang diharapkan dan terdapat 1 SKPD dalam kategori capaian “**Tinggi**”.

Capaian kinerja SKPD yang berbasis output kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Predikat Kinerja SKPD Kab. Lombok Tengah Triwulan IV tahun 2019

No	PERANGKAT DAERAH	Kinerja (%)	Rp (%)
1	Dinas Pendidikan	112.92	96.30
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
2	Dinas Kesehatan	128.36	90.89
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	99.77	92.78
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97.62	65.80
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	95.45	101.61
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	99.61	94.85
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	99.82	95.34
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96.26	96.70
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
9	Dinas Sosial	100.00	91.89
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	102.15	94.76
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	99.38	93.00
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
12	Dinas Ketahanan Pangan	111.04	95.44
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
13	Dinas Lingkungan Hidup	100.20	93.18
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	254.58	101.56
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.56	98.79
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
16	Dinas Perhubungan	82.34	81.60
		(Tinggi)	(Tinggi)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.00	95.24
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah	93.64	103.84
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	105.38	96.85
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	102.38	106.90
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23.87	109.48
		(Sangat Rendah)	(Sangat Tinggi)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	97.92	98.64
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)

No	PERANGKAT DAERAH	Kinerja (%)	Rp (%)
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	127.54	94.61
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
24	Dinas Pertanian	100.35	118.61
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	121.09	95.12
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
26	Sekretariat Daerah	99.71	96.25
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
27	Sekretariat DPRD	99.84	103.05
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
28	Kantor Camat Praya	100.00	122.88
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
29	Kantor Camat Praya Tengah	100.00	98.16
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
30	Kantor Camat Praya Barat	(Sangat Rendah)	(Sangat Rendah)
31	Kantor Camat Praya Barat Daya	(Sangat Rendah)	(Sangat Rendah)
32	Kantor Camat Praya Timur	90.00	97.46
		(Tinggi)	(Sangat Tinggi)
33	Kantor Camat Pujut	100.00	131.91
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
34	Kantor Camat Janapria	100.00	99.47
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
35	Kantor Camat Kopang	201.19	95.51
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
36	Kantor Camat Batukliang	122.22	95.58
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
37	Kantor Camat Batukliang Utara	96.15	98.89
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
38	Kantor Camat Pringgarata	113.64	97.54
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
39	Kantor Camat Jonggat	109.09	185.84
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
40	Inspektorat	106.94	95.12
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
41	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	96.17	106.93
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	95.80	91.59
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
43	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	97.19	153.69
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
44	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	111.25	94.16
		(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)

Sumber : Evaluasi Renja SKPD Kab. Lombok Tengah, 2019

Secara umum, dari 152 indikator yang telah ditetapkan, rata-rata capaian indikator program tahun 2019: 97,24%. Berikut disajikan capaian RKPD 2019 terhadap Target capaian RPJMD.

Prog. Pemb. Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi RPJMD Tahun 2018	Realisasi RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian RPJMD Sampai 2019	SKPD
				Target	Realisasi		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	PAUD terakreditasi	%	3,39	34,09	42,32	61,72	Disdik

Prog. Pemb. Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi RPJMD Tahun 2018	Realisasi RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian RPJMD Sampai 2019	SKPD
				Target	Realisasi		
Program wajib belajar dikdas 9 tahun	Capaian SPM sarana dan prasarana pendidikan dasar	%	77,17	75,25	77,27	102,52	Disdik
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Capaian SPM mutu pendidik pendidikan dasar	%	79,63	75,25	82,31	109,21	Disdik
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Capaian SPM mutu pendidik pendidikan dasar	%	79,63	75,25	82,31	109,21	Disdik
Program pendidikan non formal	Persentase melek huruf	%	89,34	88,82	89,87	96,06	Disdik
Program pendidikan non formal	Daya Tampung Lembaga Pendidikan dan Kursus	%	44,97	57	51,29	82,73	Disdik
Program pendidikan luar biasa	Cakupan Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusi	%	87,21	88,66	89,33	99,26	Disdik
Program peningkatan kapasitas aparatur kesehatan	Cakupan Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusi	%	85	83	83	97,65	Dikes
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas terhadap penduduk	unit/penduduk	01:33,0	1:30.000	1:33000	90,23	Dikes
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan primer terakreditasi	unit	23	27	28	233,33	Dikes
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat dan vaksin	%	91,23	88	93,46	103,84	Dikes
Program upaya kesehatan masyarakat	Implementasi SPM pelayanan kesehatan primer	%	90	95	90	90,00	Dikes
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lombok Tengah	%	32,50	40,4	35	79,55	Dikes
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	93	92	93	100,00	Dikes
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi status gizi masyarakat	%	17	16	13,66	111,87	Dikes
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi Case Notification Rate (CNR) - Rata-rata penemuan penyakit menular TB dan HIV-AIDS	%	100	95	96	200,00	Dikes
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penanganan KLB penyakit menular TB dan HIV-AIDS	%	100	100	100	100,00	Dikes
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) - Imunisasi Keseluruhan bagi Anak	%	98,87	100	89,29	89,29	Dikes
Program Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan masyarakat Miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	100	100	100,00	Dikes
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Capaian SPM RSUD	%	84,50	94	87,75	87,75	RSUD
Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit paru-paru/rumah sakit mata	Capaian SPM RSUD	%	84,50	94	87,75	87,75	RSUD
Program kemitraan peningkatan pelayanan	Capaian SPM RSUD	%	84,50	94	87,75	87,75	RSUD

Prog. Pemb. Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi RPJMD Tahun 2018	Realisasi RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian RPJMD Sampai 2019	SKPD
				Target	Realisasi		
kesehatan							
Program peningkatan mutu pelayanan BLUD	Akreditasi BLUD RSUD		Tipe C	Type B	Type C	50,00	RSUD
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Cakupan Layanan Penerbitan Surat Pengesahan Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan	%	41	45	40	80,00	Dikes
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kasus Kematian Bayi	Kasus/Tahun	233	173	177	93,37	Dikes
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kasus Kematian Ibu	Kasus/Tahun	24	13	28	-33,33	Dikes
Program perencanaan ruang	Jumlah Persetujuan Substansi Rencana Rinci RTRW		1	2	1	0,00	Dinas PUPR
Program perencanaan ruang	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang	Dokumen	7	8	8	88,89	Dinas PUPR
Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen tata ruang yang dipublikasikan	Dokumen	4	3	3	75,00	Dinas PUPR
Program peningkatan sarana pendukung kawasan	Jumlah kawasan strategis kabupaten yang memiliki PJU	Titik	3.866	3.666	4.105	106,18	Dinas Perkim
Program pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan kebinamargaan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	70,62	71,09	66,32	91,55	Dinas PUPR
Program pengembangan wilayah perkotaan	Cakupan layanan utilitas perkotaan	%	55,13	67,288	79,16	112,12	Dinas Perkim
Program pemeliharaan jaringan irigasi, bendungan/waduk/rawa	Luas Layanan Daerah Irigasi Kabupaten (Ha)		49.517	49.517	49.517	100,00	Dinas PUPR
Program pemeliharaan jaringan irigasi, bendungan/waduk/rawa	Persentase Panjang Saluran irigasi Induk dan sekunder dalam kondisi baik	%	87,78	88,3	90	97,07	Dinas PUPR
Program pemeliharaan jaringan irigasi, bendungan/waduk/rawa	Debit air irigasi yang tersedia	Liter/dt	23.108	23.108	28.825	124,74	Dinas PUPR
Program pengelolaan sampah	Cakupan layanan persampahan	%	20,11	18	30,7	153,50	DLH
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Bangunan gedung Kantor DPRD dan Kantor Bupati	Unit	1	2	2	100,00	Dinas PUPR
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Desa Open Defecation Free (ODF) - Bebas Buang Air Besar Sembarangan	Desa	67	77	73	83,91	Dikes
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan	Cakupan penduduk dengan akses terhadap jamban	%	80,19	87,39	84,48%	0,94	Dikes
Program lingkungan sehat perumahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang terpujar	Unit	63.867,00	66.514	61.944	93,43	Dinas Perkim
Program lingkungan sehat perumahan	Luasan Kawasan kumuh perkotaan	Ha	69,43	86	58,15	127,3	Dinas Perkim

Prog. Pemb. Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi RPJMD Tahun 2018	Realisasi RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian RPJMD Sampai 2019	SKPD
				Target	Realisasi		
Program pengembangan pengelolaan air minum	Cakupan layanan air bersih	%	76	81,5	83,33	106,08	Dinas PUPR
Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Angka kriminalitas	Kasus	237	275	295	90,74	Satpol PP
Program peningkatan kapasitas aparaturnya kebencanaan	Keahlian bidang kebencanaan yang dimiliki	%	67,47	90	69,88	69,88	BPBD
Program pengadaan sarana prasarana kebencanaan	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	%	66,67	63	66,67	96,62	BPBD
Program pengembangan sistem kebencanaan	Ketersediaan sistem peringatan dini kebencanaan di daerah rawan bencana	%	28,33	40	40	80,00	BPBD
Program penanganan Bencana	Lembaga kebencanaan yang siap berkerjasama dalam penanggulangan bencana	%	90	95	100	100,00	BPBD
Program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana	Korban bencana yang mendapatkan bantuan	%	100	100	100	100,00	BPBD
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penanganan pelanggaran perda	%	100	83	100	117,65	Satpol PP
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Cakupan layanan PMKS	%	28,27	25	40,35	155,19	Disos
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Lembaga sosial yang aktif dan berbadan hukum yang diverifikasi	Lembaga (LKS, LPK, PPTKIS)	385	521	459	77,14	Disos
Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,80	5,57	2,44	154,56	Disnakertrans
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,80	5,57	2,44	154,56	Disnakertrans
Program perlindungan lembaga ketenagakerjaan	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,80	5,57	2,44	154,56	Disnakertrans
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terlapor yang tertangani	%	100	93,75	100	100,00	DP3A2KB
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang aktif	%	61,58	76,9	69,23	69,23	DP3A2KB
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kabupaten Layak Anak	Status	belum	Belum	Belum	100,00	DP3A2KB
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Kabupaten Layak Anak	Status	belum	Belum	Belum		DP3A2KB
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Cadangan pangan pemerintah	Ton	34,7	60	60,2	85,99	Distangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa rawan pangan	Desa	0	0	0	100,00	Distangan
Program Peningkatan	Skor Pola Pangan Harapan	Point	85,50	87	90,70	103,89	Distangan

Prog. Pemb. Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi RPJMD Tahun 2018	Realisasi RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian RPJMD Sampai 2019	SKPD
				Target	Realisasi		
Ketahanan Pangan							
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Ketersediaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur	%	100	100	100	100,00	Semua SKPD
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan titik pantau kualitas air, udara dan media lingkungan lainnya	%	53	71,8	53,33	62,58	DLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan wilayah sumber mata air yang terkonservasi	Ha	25	30	33	110	DLH
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan data/ informasi SDA dan LH	dokumen	2	2	2	100,00	DLH
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat kepemilikan KTP elektronik	%	89,52	77,12	91	113,58	Disdukcapil
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat kepemilikan Akta Kelahiran	%	78,60	77,93	83,08	100,18	Disdukcapil
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat kepemilikan Kartu Keluarga	%	86,15	89,23	87,18	93,51	Disdukcapil
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Desa kurang berkembang menjadi desa berkembang	Desa	9	3	9	313,33	DPMD
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	14	3	27	433,33	DPMD
Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDes aktif	Unit	89	42	89	197,78	DPMD
Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan kelompok pemberdayaan aktif	Lembaga (kelompok)	2087	15	26	130,00	DPMD
Program Pemberdayaan Lembaga Adat Perdesaan	Jumlah lembaga adat desa aktif	Lembaga	11	16	5	23,81	DPMD
Program Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,01	1,05	1,03	97,00	DP3A2KB
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama	Tahun	19,67	20,7	19,39	92,33	DP3A2KB
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kelompok Reproduksi Remaja	Pemahaman Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja	%	8,37	8	8,17	81,70	DP3A2KB
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rasio Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dengan Keluarga Sasaran BKB	%	84,27	87	84,69	94,10	DP3A2KB
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Keluarga Pra Sejahtera	%	28,17	19	19	73,33	DP3A2KB
Program peningkatan sarpras keselamatan jalan	Persentase jalan kabupaten yang memiliki fasilitas keselamatan jalan	%	65	80	90,9	101,00	Dishub

Prog. Pemb. Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi RPJMD Tahun 2018	Realisasi RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian RPJMD Sampai 2019	SKPD
				Target	Realisasi		
Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah terminal yang berfungsi		1	1	1	200,00	Dishub
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	Cakupan layanan telekomunikasi (coverage area)	%	96	100	96,40	96,40	Diskominfo
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi berkualitas	Unit	326	335	331	95,94	DiskopUKM
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi baru	Unit	10	10	20	200,00	DiskopUKM
Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Jumlah Usaha Menengah	unit	38	40	40	100,00	DiskopUKM
Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Jumlah Usaha Kecil	Unit	1.494	1.504	1.512	99,87	DiskopUKM
Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Jumlah Usaha Mikro	Unit	156.979	157.477	157.482	99,69	DiskopUKM
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Nilai investasi PMDN	Milyar Rupiah	1.172,13	1.164,44	1.290,94	110,86	DPMPSTP
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Nilai investasi PMA	Juta US Dolar	1.475,91	1.354,67	1.545,84	114,11	DPMPSTP
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan	Point	78,75	81,15	75,5	91,79	DPMPSTP
Program pembinaan dan pengembangan prestasi pemuda dan olahraga	Jumlah atlet dan pemuda berprestasi yang dicapai pada tingkat regional, nasional dan internasional	Orang/ Tahun	25	20	38	172,73	Dispora
Program pengembangan data/informasi	Ketersediaan Data yang Valid dan Berkualitas	Jenis Data	9	8	9	112,50	Bappeda
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event kepariwisataan yang dilaksanakan	Event/ Tahun	9	4	5	125,00	Disparbud
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Rasio ketersediaan buku di perpustakaan daerah	%	61,3	91,02	93,3	93,30	Dispuser
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah	Orang/ Tahun	24.706	27.260	33.758	116,55	Dispuser
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Cakupan pelayanan arsip daerah	%	100	97	116	116,00	Dispuser
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya:- Rumput Laut	Ton/ Tahun	38871,79	77.214,98	43.740,99	55,13	Dislutkan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya:- Ikan Budidaya	Ton/ Tahun	34.472,46	33.092,14	31.333,52	92,15	Dislutkan
Program Pengembangan	Kawasan perikanan unggulan	Kawasa n	0	2	0	0,00	Dislutkan

Prog. Pemb. Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi RPJMD Tahun 2018	Realisasi RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian RPJMD Sampai 2019	SKPD
				Target	Realisasi		
Budidaya Perikanan							
Program Pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton/Tahun	2.897	2.448	2.375	95,88	Dislutkan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton/Tahun	39,43	4.307,25	4.414,36	101,64	Dislutkan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Produksi garam rakyat	Ton/Tahun	3.202	3.307	3.300	97,84	Dislutkan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (overnight visitor)	Orang/Tahun	70.539	68.678	74.875	46,16	Disparbud
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan domestik (overnight visitor)	Orang/Tahun	83.176	80.947	61.700	68,06	Disparbud
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	3,00	3,84	3,00	74,26	Disparbud
Program pengembangan kemitraan	Jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang tersertifikasi	Orang	300	387	300	73,71	Disparbud
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Penyuluh yang Dilatih	Orang	29	58	39	44,32	Distan
Program peningkatan kesejahteraan petani	Jumlah Kelompok Tani Madya	Kelompok	473	295	313	103,64	Distan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura: - Padi	Ton/Tahun	518.764	496.697	502.639	99,70	Distan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:- Jagung	Ton/Tahun	95940	41.728	70.450	165,52	Distan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:- Kedelai	Ton/Tahun	24916	43.421	16.321	35,57	Distan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:- Melon	Kw/Tahun	9085	12.145	26.374	212,90	Distan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Hasil Perkebunan:- Tembakau virginia	Ton/Tahun	19.275,23	18.538,00	20.798,00	105,98	Distan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Hasil Perkebunan:- Tembakau rajangan	Ton/Tahun	1.040,6	924,0	924,4	88,04	Distan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Hasil Perkebunan:- Kelapa	Ton/Tahun	369,36	11.255,00	8.131,57	70,26	Distan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Hasil Perkebunan:- Kopi	Ton/Tahun	369,4	459,0	540,0	113,92	Distan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Hasil Perkebunan:- Jambu Mete	Ton/Tahun	878,06	1.362,00	861,44	58,36	Distan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Hasil Perkebunan:- Kakao	Ton/Tahun	45,34	162,00	45,52	27,59	Distan
Program peningkatan	Kawasan pertanian/perkebunan	Kawasa	1	2	2	100,00	Distan

Prog. Pemb. Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi RPJMD Tahun 2018	Realisasi RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian RPJMD Sampai 2019	SKPD
				Target	Realisasi		
produksi pertanian/ perkebunan	unggulan	n					
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi hasil peternakan:- Sapi	ekor	173939	169.097	176.992	103,62	Distan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi hasil peternakan:- Kambing	ekor	115779	120.049	116.464	93,56	Distan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi hasil peternakan:- Ayam Buras	ekor	3022279	2.908.469	3.205.454	96,13	Distan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi hasil peternakan:- Itik	ekor	769258	773.828	765.463	97,05	Distan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah ternak (sapi, kerbau, kambing, kuda) terjual	ekor/ tahun	5848	6.433	8.317	117,54	Distan
Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pasar yang baik	Unit	13	15	19	105,56	Disperindag
Program Pembinaan pedagang kaki lima	Jumlah kawasan PKL yang tertata	Kawasa n	7	11	11	84,62	Disperindag
Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	unit/ tahun	1.927	2.750	4.904	163,47	Disperindag
Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah fasilitasi HKI bagi IKM	Unit	29	35	39	95,12	Disperindag
Program Pengembangan industri kecil dan menengah	IKM yang difasilitasi PIRT	Unit	239	215	265	110,42	Disperindag
Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang menerapkan GKM (Gugus Kendali Mutu)	Unit	37	42	42	93,33	Disperindag
Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Kawasan wisata industri kecil menengah	Kawasa n	3	2	3	75,00	Disperindag
Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Nilai ekspor	Juta rupiah/ Tahun		2.600	6.762	250,44	Disperindag
Program pengembangan wilayah transmigrasi	Jumlah keluarga transmigrasi yang dibina	KK	284	321	286	75,86	Disnakertrans
Program peningkatan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah daerah	Level Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah	Level	Level 3	Level 3	Level 3	200,00	Inspektorat
Program peningkatan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah daerah	Rekomendasi hasil temuan yang ditindaklanjuti	%	96,00	88	94,80	105,33	Inspektorat
Program peningkatan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah daerah	Maturitas SPIP		level 3	Level 3	Level 3	100,00	Inspektorat
Program perencanaan pembangunan daerah	Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan	%	100	100	100	100,00	Bappeda
Program kerjasama	Kerjasama Pembangunan yang	Buah	4	2	3	150,00	Bappeda

Prog. Pemb. Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi RPJMD Tahun 2018	Realisasi RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian RPJMD Sampai 2019	SKPD
				Target	Realisasi		
pembangunan	Difasilitasi						
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai kinerja pemda	Nilai Lakip/ LKJIP	C	B	C	50,00	Setda
Program perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Nilai kinerja pemda	Nilai Lakip/ LKJIP	C	B	C	50,00	Setda
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Opini		WTP	WTP	100,00	BPKAD
Program peningkatan dan pengembangan pendapatan asli daerah	Realisasi PAD	Rupiah	162.745.854.546,8800	174.284.570.441	159.318.063.591	88,51	Bapenda
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur mengikuti diklat dalam jabatan	%	48,8	65	68	100,00	Bad Kepeg Diklat
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Cakupan layanan kepegawaian	%	100	100	100	100,00	Bad Kepeg Diklat
Program pengembangan sistem inovasi daerah	Jumlah Kerjasama Inovasi	Buah	4	5	5	83,33	Bappeda
Program pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah	Keterlibatan pengurus rumah ibadah dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100,00	Setda
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Konflik horisontal yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100,00	Satpol PP
Program penanganan konflik sosial							Satpol PP
Program pendidikan politik masyarakat	Pemilih aktif dalam pemilukada	%	72	66,6	67,99	97,13	Kesbangpolda gri
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio Sarana Prasarana Pemerintah Daerah yang Laik Pakai	%	78	95	79,5	83,68	BPKAD
Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100,00	SKPD
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase Koordinasi	%	100	100	100	100,00	Setda
Program kerjasama informasi dengan media	Intensitas penyebarluasan informasi	Kali/ Tahun	12	12	12	100,00	Setda
Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan	Cakupan layanan administrasi kecamatan	%	100	100	100	100,00	Kecamatan
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat	Cakupan layanan administratif pada anggota DPRD	%	100	100	100	100,00	Setwan

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan pembangunan adalah :

- a) Pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca covid-19
- b) Angka Kemiskinan masih relatif tinggi;
- c) Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif masih rendah;
- d) Kondisi infrastruktur dasar masih belum memadai;
- e) Kinerja apartur sipil negara/lembaga pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan;
- f) Stabilitas keamanan dan ketertiban masih perlu ditingkatkan;
- g) Angka pengangguran relatif masih tinggi;
- h) Pendayagunaan sumber daya alam/sosial budaya masih belum optimal

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a) Kualitas layanan pendidikan masih perlu ditingkatkan;
- b) Masih tinggi penduduk buta huruf usia di atas 60 tahun;
- c) Cakupan pendidikan inklusi masih rendah pada satuan pendidikan dasar;
- d) Masih rendahnya tingkat rata-rata lama sekolah;
- e) Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu ditingkatkan;

2. Urusan Kesehatan

- a) Kualitas layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan;
- b) Angka kematian ibu melahirkan dan bayi;
- c) Penurunan stunting;
- d) Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan pada jampersal dan JKN;
- e) Penurunan angka morbiditas;
- f) Peningkatan kualitas pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pemeliharaan jalan kabupaten;
- b. Peningkatan jalan kabupaten kondisi mantap;
- c. Pemeliharaan sarana prasarana irigasi;
- d. Pengelolaan irigasi
- e. Pengendalian pemanfaatan ruang masih rendah

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Penanganan Rumah tidak layak huni;
- b. Penataan lingkungan permukiman terutama di wilayah perkotaan;
- c. Akses air bersih;
- d. Masih kurangnya kawasan Ruang Terbuka Hijau

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Penanganan konflik sosial;
- b. Peningkatan pengendalian keamanan lingkungan;
- c. Peningkatan kapasitas aparaturnya keamanan;
- d. Koordinasi lintas agama dan pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan;
- e. Peningkatan kualitas mitigasi bencana;
- f. Penguatan pusdatin dan pusdalop;

6. Sosial

- a. Peningkatan cakupan layanan PMKS;
- b. Verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial;
- c. Peningkatan kesiapsiagaan penanganan tanggap darurat;
- d. Peningkatan pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 - b. Peningkatan perluasan kesempatan kerja;
 - c. Peningkatan penyelesaian masalah hubungan industrial;
 - d. Peningkatan kualitas lembaga pelatihan swasta berbasis kompetensi;
 - e. Peningkatan kualitas hubungan industrial yang harmonis dan dinamis.
 - f. Peningkatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri (TKM);
 - g. Optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial;
 - h. Revitalisasi balai latihan kerja.
- 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- a. Peningkatan kualitas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Penguatan pengarusutamaan gender;
 - c. Peningkatan ketahanan institusi keluarga;
- 3. Pangan**
- a. Masih terdapat potensi desa rawan pangan;
 - b. Keamanan pangan;
 - c. Keanekaragaman atau diversifikasi pangan;
 - d. Akses pangan;
- 4. Lingkungan Hidup**
- a. Prasarana, teknologi pengolahan, dan kesadaran masyarakat tentang sampah;
 - b. Perlindungan mata air;
 - c. Baku mutu lingkungan;
 - d. Akses sanitasi komunal dan keluarga;
- 5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- a. Cakupan layanan adminduk berbasis teknologi informasi;
 - b. Perluasan layanan adminduk;
- 6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
- a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. Revitalisasi posyandu;
 - c. Penguatan BUMDes;
 - d. Peningkatan dan pemanfaatan produk unggulan desa;
- 7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
- a. Cakupan akseptor KB aktif;
 - b. Peningkatan pendewasaan usia perkawinan;
 - c. Penurunan laju pertumbuhan penduduk;
- 8. Perhubungan**
- a. Pengelolaan parkir;
 - b. Peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan jalan;
 - c. Akreditasi balai pengujian kendaraan;
- 9. Komunikasi dan Informatika**
- a. Masih terdapat blankspot;
 - b. Pengembangan smartcity;
 - c. Satu data indonesia;
- 10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
- a. Masih rendahnya kualitas manajemen koperasi;
 - b. Belum optimalnya fasilitasi bagi koperasi untuk mengakses permodalan;
 - c. Masih rendahnya cakupan akses permodalan UMKM dari lembaga keuangan (Perbankan dan non Perbankan).
 - d. Daya saing kualitas dan kuantitas produk UMKM masih rendah.

11. Penanaman Modal

- a. Kecepatan pelayanan perizinan;
- b. Promosi investasi;
- c. Investasi masih belum optimal;
- d. Potensi investasi belum dimanfaatkan secara optimal.

12. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga;
- b. Peningkatan olahraga rekreasi;
- c. Penguatan kualitas kelembagaan pemuda
- d. Peningkatan peran serta pengurus cabang olahraga, masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan prestasi olahraga.

Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Pengembangan kawasan unggulan;
- b. Daya saing produk perikanan dan kelautan;
- c. Sarana dan prasarana produksi perikanan;
- d. Industrialisasi produk perikanan.

2. Pariwisata

- a. Pemasaran dan branding kepariwisataan daerah belum optimal;
- b. Kapasitas sumber daya pariwisata masih belum sesuai kebutuhan;
- c. Ketersediaan infrastruktur penunjang pariwisata;
- d. Atraksi wisata.

3. Pertanian

- a. Produktifitas dan mutu produk pertanian;
- b. Pengembangan kawasan pertanian;
- c. Ketersediaan supply air untuk pengembangan pertanian;
- d. Kelembagaan dan pemberdayaan petani;
- e. Industrialisasi pertanian.

4. Perdagangan dan Perindustrian

- a. Daya saing mutu dan produk industri masih rendah;
- b. Peningkatan kualitas manajerial pengelolaan pasar;
- c. Penataan pedagang kaki lima belum optimal.

5. Transmigrasi

- a. Peningkatan kualitas pembinaan transmigran;
- b. Penambahan kuota lokasi transmigrasi yang ditempatkan.

6. Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan;
- b. Peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan;
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah;

Penunjang urusan pemerintahan :

- a. Integrasi dan sinergisitas dokumen perencanaan pembangunan masih kurang;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen kepegawaian;
- c. Masih rendahnya kepatuhan terhadap rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. Efektifitas perumusan kebijakan dan koordinasi implementasi kebijakan pemerintahan daerah masih kurang optimal;
- e. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah;

BAB III
RANCANGAN KERANGKA
EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH



3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian Tahun 2020-2021. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Lombok Tengah serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 disusun secara teknokratis dengan pendekatan kajian internal dan eksternal daerah. Untuk menjaga kesinambungan perencanaan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah disusun dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2019 dan pencapaian kinerja perekonomian daerah tahun 2019. Untuk menjamin keserasian perencanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah, arah kebijakan ekonomi harus mengacu dan sejalan dengan RKP dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. Tujuan dari internalitas dan eksternalitas ini adalah agar terjalin sinergitas antar dokumen perencanaan, serta menjaga kesinambungan perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2021

a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019

Beberapa hal yang terkait dengan kondisi ekonomi tahun 2019 adalah pengembangan kondisi perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya maupun variabel yang melingkupinya yang diuraikan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai 17,88 triliun rupiah, meningkat sebesar 6,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan terjadinya peningkatan volume produksi sekaligus perubahan harga barang dan jasa yang

dihasilkan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 12,40 triliun rupiah, meningkat 4,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010
Tahun 2016-2019 (juta rupiah)

Tahun	Berlaku	Konstan 2010
(1)	(2)	(3)
2016	14.423.751,17	10.854.980,04
2017	15.789.214,15	11.551.693,67
2018*	16.750.495,68	11.918.408,40
2019**	17.881.010,00	12.403.660,00

* angka sementara

** angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2019, perekonomian Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan sebesar 4,01 persen. Hal ini karena meningkatnya produksi pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik gas dan konstruksi yang didorong oleh adanya investasi terutama investasi pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur pengembangan kawasan KEK Mandalika.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori Tahun 2016-2019 (persen)

Kategori	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,86	6,37	2,31	1,69
B Pertambangan dan Penggalian	9,36	7,12	5,86	12,83
C Industri Pengolahan	3,19	4,69	1,47	3,52
D Pengadaan Listrik dan Gas	9,85	5,39	1,14	9,59
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,72	3,95	1,18	-0,97
F Konstruksi	8,68	7,03	5,49	14,91
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,12	7,93	5,73	6,31
H Transportasi dan Pergudangan	5,74	6,23	-1	-5,6
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,54	7,01	2,33	2,6
J Informasi dan Komunikasi	8,62	8,02	5,34	4,32
K Jasa Keuangan dan Asuransi	11,11	10,48	6,87	1,49
L Real Estat	6,54	6,81	5,04	4,98
M,N Jasa Perusahaan	6,72	5,34	5,28	5,09
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,31	2,56	0,77	3,43
P Jasa Pendidikan	6,01	5,62	5,68	7,26
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,78	6,02	7,89	6,58
R,S,T,U Jasa lainnya	6,25	6,81	5,38	5,51
PDRB	5,65	6,42	3,17	4,07

* angka sementara

** angka sangat sementara

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat peranan suatu kategori terhadap total perekonomian Kabupaten Lombok Tengah adalah sumber pertumbuhan (source of growth). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.3
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016-2019 (persen)

Kategori		2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,76	1,66	0,58	0,43
B	Pertambangan dan Penggalian	0,39	0,31	0,21	0,57
C	Industri Pengolahan	0,19	0,26	0,08	0,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,00	0,00	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,00	0,00
F	Konstruksi	1,07	0,90	0,62	1,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,87	0,87	0,62	0,72
H	Transportasi dan Pergudangan	0,99	1,06	(0,02)	(0,92)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,10	0,08	0,02	0,03
J	Informasi dan Komunikasi	0,15	0,14	0,09	0,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,21	0,21	0,14	0,03
L	Real Estat	0,22	0,23	0,17	0,17
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,12	0,13	0,09	0,17
P	Jasa Pendidikan	0,26	0,25	0,23	0,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,15	0,20	0,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,14	0,16	0,12	0,13
PDRB		5,65	6,42	3,17	4,01

* angka sementara

** angka sangat sementara

Pada tabel 3.3 di atas dapat dilihat sumber pertumbuhan Lombok Tengah terbesar dari konstruksi sebesar 1,95 persen diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang juga menyumbang pertumbuhan 0,72 persen. Untuk lebih meningkatkan perekonomian Lombok Tengah, pemerintah dapat mengembangkan kedua kategori tersebut dengan melakukan inovasi dalam kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari setiap kategori tersebut. Selain itu, kelestarian lingkungan juga harus tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan masalah baru dalam pengembangan sektor ekonomi.

2. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan positif pada kurun waktu 2011-2019 dari Rp.8.720.501 pada tahun 2011 menjadi Rp 12.415.113 pada tahun 2019. Adapun perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2019

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2010
2011	8.963.063	8.720.501
2012	10.358.152	9.844.760
2013	11.460.342	10.241.302
2014	12.912.496	10.768.803
2015	14.462.890	11.252.161

2016	15.915.917	11.771.045
2017	17.144.157	12.415.113
2018	17.830.887	12.578.954
2019	18.872.017	13.091.100

Keterangan: *)Data Sementara, **) Data Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2019

3. Kemiskinan

Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan pada kurun waktu 2011-2019 baik secara absolut maupun relatif. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2011-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2011	159.046	18,14
2012	148.153	16,72
2013	145.151	16,20
2014	141.334	16,03
2015	147.940	16,26
2016	145.370	15,80
2017	142.412	15,31
2018	130.000	13,87
2019	128.820	13,63

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2019

B. Perkiraan Ekonomi Daerah Tahun 2021

Berdasarkan kondisi perekonomian domestik dan regional dan kondisi wabah covid-19 di tahun 2020 yang diperkirakan berpengaruh besar terhadap kinerja ekonomi di tahun 2020, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah diharapkan akan membaik di tahun 2021. Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 3,75 - 4,75%
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran, 12,95 – 13,22%
3. Gini ratio pada kisaran 0,331 – 0,330
4. Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 2,91 – 2,83%
5. Sasaran pemertaan pembangunan dengan target indekw williamson kisaran 0,40 – 0,39.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi regional daerah yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah dihadapkan pada berbagai peluang yang harus diraih dengan aksi nyata. Beberapa peluang tersebut antara lain:

- a) Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah sebagai dampak dari wabah Covid-19 di tahun 2020, perekonomian Kabupaten Lombok Tengah di tahun 2021 diharapkan tidak mengalami pelambatan seiring dengan pengembangan Kawasan KEK Mandalika.
- b) sumber pertumbuhan Lombok Tengah terbesar adalah kategori Pertanian dan tidak hanya sebagai penyumbang pertumbuhan terbesar saja, namun kategori ini juga penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi Lombok Tengah. Untuk lebih

meningkatkan perekonomian Lombok Tengah, pemerintah dapat mengembangkan kategori ini dengan melakukan inovasi dalam kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah.

Disamping peluang-peluang tersebut, di tahun 2021 Kabupaten Lombok Tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain sebagai berikut:

- a) Transformasi berbagai aktivitas kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan pasca Covid-19 atau era baru harus dilakukan secara cepat, tepat dan inovatif.
- b) Peningkatan kualitas SDM menjadi sebuah keharusan baik itu bagi para pelaku di berbagai sektor maupun aparatur sipil negara mutlak diperlukan sebagai akibat adanya perubahan fundamental di berbagai sektor (disrupsi) terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengakibatkan perubahan pola kerja baik di sektor bisnis maupun pelayanan publik.
- c) Mendorong peningkatan kapasitas produksi dan daya saing produk olahan daerah dengan sepenuhnya memanfaatkan sumber daya lokal serta memperkuat jejaring kemitraan antar lembaga-lembaga usaha.
- d) Memertahankan kondisi keamanan dan ketertiban daerah yang kondusif menjadi keharusan dalam upaya memberikan suasana aman dan nyaman dalam berusaha dan berinvestasi.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah pada umumnya menjadi arah utama Kebijakan pengembangan keuangan daerah yang dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Namun demikian, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah sepenuhnya masih bergantung dana transfer dari pusat meskipun pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : (a) Kebijakan pemerintah, (b) Pendapatan masyarakat, (c) Fluktuasi harga komoditas andalan, dan (d) Kondisi daerah yang cukup aman.

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sisi pendapatan terhadap kebutuhan belanja daerah masih tertata dengan baik dan untuk tahun-tahun ke depan diupayakan akan semakin baik.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan mengenai pendapatan daerah diharapkan dapat mendukung pembiayaan belanja daerah.

- Pendapatan Asli Daerah.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai berikut :

- (1) Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi.
- (2) Ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi khususnya perkembangan hotel baru baik yang dibangun di dalam KEK maupun di luar kawasan sekitar KEK.

- Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan bagi hasil pendapatan (*revenue sharing policy*). Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Terhadap dana perimbangan ini maka strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan adalah dengan melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan. Berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional maka diproyeksikan pada tahun 2021 DAU Kabupaten Lombok Tengah diproyeksi sama dengan DAU tahun anggaran 2020.

- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

- (1) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi guna meningkatkan penerimaan sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Tabel 3.6
Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2021

Kode	Uraian	APBD 2019	APBD 2020	Rancangan Akhir RKPD 2021
4	PENDAPATAN	2.155.687.126.109,00	2.296.599.627.613,00	2.302.843.137.000,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	202.494.241.000,00	225.842.904.098,00	218.569.434.500,00
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	73.180.915.000,00	81.298.329.000,00	73.598.329.700,00
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	23.587.547.000,00	24.973.133.000,00	22.688.211.800,00
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.376.596.000,00	14.474.016.000,00	11.507.005.000,00
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	93.349.183.000,00	105.097.426.098,00	110.775.888.000,00
4 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.564.779.169.000,00	1.640.814.171.000,00	1.640.814.171.000,00
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	77.188.937.000,00	78.780.311.000,00	78.780.311.000,00

Kode	Uraian	APBD 2019	APBD 2020	Rancangan Akhir RKPD 2021
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.028.786.865.000,00	1.049.533.476.000,00	1.049.533.476.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	458.803.367.000,00	512.500.384.000,00	512.500.384.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	388.413.716.109,00	429.942.552.515,00	443.459.531.500,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	98.153.011.000,00	103.153.011.000,00	109.169.988.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	82.526.493.109,00	90.219.258.515,00	97.719.260.500,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	207.459.593.000,00	236.268.283.000,00	236.268.283.000,00
4.3.6	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	274.619.000,00	302.000.000,00	302.000.000,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2020

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJP Fase Kedua pada tahun 2021 dan mendukung pencapaian target-target yang belum tercapai pada fase pertama. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 mekanisme APBD menggunakan sistem Anggaran Berbasis Kinerja. Kondisi tersebut berakibat pada perencanaan penganggaran terutama pada sisi belanja daerah yang harus terukur baik kinerja maupun jumlah kebutuhannya.

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Strategi, arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2021 adalah :

- 1) Pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja gaji/tunjangan dan belanja pembayaran pokok utang pinjaman
- 2) Mengalokasikan belanja daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi NTB dalam kerangka otonomi daerah Negara kesatuan Republik Indonesia
- 3) Peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah
- 4) Menitikberatkan alokasi Belanja Daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Tabel 3.7
Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2021

Kode	Uraian	APBD 2019	APBD 2020	Rancangan Akhir RKPD 2021
5	BELANJA	2.177.163.526.109,00	2.322.729.524.329,00	2.280.843.137.000,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.188.223.473.109,00	1.287.239.422.900,00	1.339.832.767.265,00
5.1.1	Belanja Pegawai	818.070.113.087,00	848.980.538.723,00	942.622.375.087,00
5.1.2	Belanja Bunga	4.286.051.822,00	4.767.062.477,00	4.767.062.477,00
5.1.4	Belanja Hibah	42.487.500.000,00	91.679.746.000,00	51.629.746.001,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.561.191.000,00	1.048.691.000,00	1.048.691.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.676.847.000,00	10.627.147.000,00	9.628.655.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	306.141.770.200,00	327.576.237.700,00	327.576.237.700,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	2.560.000.000,00	2.560.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	988.940.053.000,00	1.035.490.101.429,00	941.010.369.735

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2020

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2021 adalah Alokasi pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang.

Adapun Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 -2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Anggaran dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2021

Kode	Uraian	APBD 2019	APBD 2020	Rancangan RKPD 2021
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	79.959.000.000,00	48.129.896.716,00	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		38.350.911.016,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	79.959.000.000,00	9.778.985.700,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	79.959.000.000,00	26.129.896.716,00	-22.000.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	58.482.600.000,00	0,00	0,00
---	-------------------	------	------

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2020

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2021



4.1 Tema Pembangunan Daerah

Tema pembangunan daerah pada RKPDP tahun 2021 dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPDP tahun 2021 mengacu dan memperhatikan Konsistensi antara kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Lombok Tengah. Tema pembangunan yang diusung dalam RKPDP tahun 2021 adalah: **“Penguatan Nilai Tambah Produk Lokal, Kawasan Unggulan dan Investasi Didukung SDM Berdaya Saing Serta Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Berkualitas”** Tema tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu:

- 1) Stabilitas keamanan dan ketertiban
- 2) Layanan pendidikan yang inklusif
- 3) Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia
- 4) Percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja
- 5) Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi
- 6) Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman
- 7) Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi

Penetapan tema dan prioritas pembangunan dalam RKPDP 2021 adalah sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional, tingkat provinsi maupun Kabupaten. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2021.

4.2 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Tahun kelima RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021, dengan Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu 2016 – 2021 yaitu : **“ Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu”**.

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu :

- kata **‘beriman’** berarti masyarakat yang melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;

- kata **'sejahtera'** berarti masyarakat yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya, yaitu sandang, pangan, papan, serta mendapatkan rasa aman;
- kata **'bermutu'** berarti masyarakat yang mampu berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, karena punya tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai nilai agama dan kearifan lokal
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender
3. Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas
4. Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi sampai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat dijabarkan kedalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Penjabaran Misi dalam RPJMD Kab. Lombok Tengah 2016-2021

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU		
Misi	Tujuan	Sasaran
MISI KESATU:		
MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL	1. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama	1. Terpeliharanya stabilitas sosial
		2. Terpeliharanya kerukunan umat beragama
MISI KEDUA:		
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pendidikan
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
MISI KETIGA:		
MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS	1. Meningkatnya Perekonomian Daerah	1. Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah
		2. Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan
MISI KEEMPAT:		
MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI	1. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan	1. Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU		
Misi	Tujuan	Sasaran
	antar kawasan	wilayah
		2. Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas
		3. Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman
		4. Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri
MISI KELIMA:		
MEWUJUDKAN KEPERINTAHAN YG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUMDENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
		2. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. prioritas pembangunan tahun 2021 adalah:

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Prioritas Daerah
Ketahanan ekonomi utk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Penguatan mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur layanan dasar serta konektivitas antar wilayah	Stabilitas keamanan dan ketertiban
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan akuntabilitas dan kualitas birokrasi serta pelayanan publik	Layanan pendidikan yang inklusif
Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	Pembangunan sumber daya manusia	Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	Percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan nilai tambah perekonomian melalui modernisasi pertanian, industri pengolahan dan pariwisata	Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim		Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi

Prioritas pembangunan daerah yaitu tema/agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah yang berisi program atau gabungan program prioritas.

No	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Sampai 2019	Target kinerja RKPd 2021
1	Stabilitas keamanan dan ketertiban	Terpeliharanya Stabilitas Sosial	Tingkat kriminalitas)*	Kasus/100.000 penduduk	92,82	81,63
		Terpeliharanya kerukunan umat beragama	Konflik berlatar belakang agama	Kasus	0	0
2	Layanan pendidikan yang inklusif	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah)*	Tahun	5,96	6,88
			Harapan lama sekolah)*	Tahun	13,47	14,15
			PAUD terakreditasi A	%	0	1,53
			SD terakreditasi A	%	5,46	6,86
			SMP terakreditasi A	%	8,94	13,97
3	Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup)*	Tahun	65,59	66,06
4	Percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja	Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja	Angka PMKS	orang	23.636	1.092
			tingkat partisipasi angkatan kerja)*	%	66,97	74,65
			Pengeluaran per Kapita disesuaikan)*	Rp (000/tahun)	9.800	10.252
5	Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan)*	%	1,47	4,68
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum)*	%	2,04	8,81
		Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan	Rata-rata Nilai Tukar Petani	Poin	114,47	114,47
			Skor Pola Pangan Harapan	Poin	90,7	90,7
		Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	27	35
6	Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman	Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	84,91	84,91
		Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,25	66,25
			Ketaatan terhadap RTRW	%	81,40	86,71
		Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	51,85	11,65

No	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Sampai 2019	Target kinerja RKPD 2021
			Spot kawasan kumuh dan rawan bencana	Spot	4	1
7	Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP)*	Nilai	CC	B
			Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	WTP	WTP
		Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	%	9,39	9,39

*) Realisasi 2018

4.4 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Berikut disajikan arah kebijakan pada tujuh prioritas pembangunan tahun 2021:

Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
stabilitas keamanan dan ketertiban	Terpeliharanya Stabilitas Sosial	Peningkatan pengendalian keamanan dan ketertiban pada kawasan-kawasan vital dan strategis
		Pengamanan lingkungan partisipatif
		Peningkatan kualitas layanan keagamaan
	Terpeliharanya kerukunan umat beragama	Peningkatan peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pembinaan kerukunan beragama
		Pencegahan konflik berlatar belakang SARA
Layanan pendidikan yang inklusif	Meningkatnya kualitas pendidikan	Pendidikan inklusi pendidikan dasar
		Pencapaian SPM Pendidikan dasar
		Percepatan akreditasi PAUD dan SMP
		Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kampanye gerakan hidup sehat
		Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak
		Perbaikan gizi masyarakat dan penanganan stunting
		Peningkatan mutu layanan kesehatan
		Peningkatan kapasitas tenaga medis
Percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja	Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja	Fasilitasi sertifikasi BPOM produk olahan
		Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui BUMDes
		Jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin
		Peningkatan keterampilan berusaha bagi masyarakat miskin
		Penguatan kelompok afinitas di desa prioritas rawan pangan
		Dukungan sarana berusaha bagi masyarakat miskin
		Peningkatan akses air bersih bagi masyarakat miskin

Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
		Pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni
		Dukungan sanitasi layak bagi keluarga miskin
		Peningkatan keahlian bagi tenaga kerja
		Penyiapan tenaga kerja siap pakai melalui program magang
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah	Pemantapan produk IKM
		Revitalisasi pasar rakyat
		Pengembangan sentra IKM
		Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam pemasaran
		Pengembangan Inovasi Media Promosi Investasi
		Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Pengembangan promosi wisata berbasis teknologi informasi
		Pengembangan SDM pengelola wisata
		Penguatan iklim investasi
		Pembinaan sanggar dan atraksi budaya
	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan	Peningkatan akses pangan
		Pengembangan kawasan tanaman hortikultura
		Pengembangan kawasan perkebunan
		Pengembangan kawasan budidaya laut dan air tawar
		Rehabilitasi Embung dan Jaringan Irigasi, Pembangunan Embung Penampung Air
Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman	Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah	Pembangunan jalan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
		Peningkatan jaringan layanan komunikasi
	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Peningkatan sarana dan prasarana utilitas pemukiman
	Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Penguatan Kelompok masyarakat peduli sampah
		Pengendalian pemanfaatan ruang
		Penanganan kebencanaan
Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan administrasi kependudukan
	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Pengembangan smart tax dan penguatan basis data

4.5 Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19

Dalam rangka percepatan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca Covid-19, kebijakan pemerintah daerah diarahkan pada:

- a. Penguatan Layanan Kesehatan, melalui:
 - Penekanan pola hidup bersih dan sehat
 - Penguatan sarpras kesehatan
 - Peningkatan kompetensi tenaga medis

- b. Pemulihan Ekonomi
 - Pemberdayaan UMKM
 - Pemulihan pariwisata dan investasi

- c. Penguatan Perlindungan Sosial, melalui:
 - Penguatan jaminan kesehatan
 - Penguatan data DTKS

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



Sebagai implementasi prioritas dan arah penguatan program secara lebih terperinci, maka direncanakan beberapa program prioritas dan indikator kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 yang mengacu pada prioritas dan sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	OPD
stabilitas keamanan dan ketertiban	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Patroli Pengendalian keamanan lingkungan	Satpol PP
stabilitas keamanan dan ketertiban	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
stabilitas keamanan dan ketertiban	Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	DPMD
stabilitas keamanan dan ketertiban	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Koordinasi Lintas Agama	Kesbangpoldagri
stabilitas keamanan dan ketertiban	Program Penanganan Konflik Sosial	Rencana aksi penanganan konflik sosial	Kesbangpoldagri
stabilitas keamanan dan ketertiban	Program Penanganan Konflik Sosial	Pemantauan Aliran Kepercayaan	Kesbangpoldagri
stabilitas keamanan dan ketertiban	Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah	Penguatan Kelembagaan Rumah Ibadah	Setda
Layanan pendidikan yang inklusif	Program Pendidikan Non Formal	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Disdik
Layanan pendidikan yang inklusif	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Disdik
Layanan pendidikan yang inklusif	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Disdik
Layanan pendidikan yang inklusif	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Disdik
Layanan	Program Wajib Belajar	Penyelenggaraan akreditasi sekolah	Disdik

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	OPD
pendidikan yang inklusif	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	dasar	
Layanan pendidikan yang inklusif	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pendidikan	Disdik
Layanan pendidikan yang inklusif	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Disdik
Layanan pendidikan yang inklusif	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan	Disdik
Layanan pendidikan yang inklusif	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan kualitas literasi dan numerasi guru	Disdik
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Dikes
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Revitalisasi sistem kesehatan	Dikes
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan imunisasi	Dikes
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Dikes
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penanggulangan Kurang Gizi pada anak dan balita	Dikes
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal)	Dikes
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Dikes
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	DPMD
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Pengadaan puskesmas keliling	Dikes
Gerakan hidup sehat dan	Program Peningkatan Mutu Pelayanan	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Dikes

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	OPD
layanan kesehatan di segala usia	Kesehatan Dasar		
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Dikes
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pembangunan sarana penunjang Rumah Sakit	Dikes
Percepatan penurunan kemiskinan	Program pengembangan Ekonomi pedesaan	Pembinaan Pengelolaan BUMDes	DPMD
Percepatan penurunan kemiskinan	Program pengembangan Ekonomi pedesaan	Peningkatan dan Pemanfaatan Produk Unggulan Desa	DPMD
Percepatan penurunan kemiskinan	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Dikes
Percepatan penurunan kemiskinan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	Dinsos
Percepatan penurunan kemiskinan	Program Keluarga Berencana	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	DP3AP2KB
Percepatan penurunan kemiskinan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pengembangan program SLRT	Dinsos
Percepatan penurunan kemiskinan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Percepatan penurunan kemiskinan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Percepatan penurunan kemiskinan	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	DINAS KOPERASI & UKM
Percepatan penurunan kemiskinan	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana KUKM	DINAS KOPERASI & UKM
Percepatan penurunan kemiskinan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penanganan pasca dan pengolahan hasil tanaman pangan	DINAS PERTANIAN
Percepatan penurunan kemiskinan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Peningkatan skala usaha kelompok tani ternak	DINAS PERTANIAN
Percepatan penurunan kemiskinan	Program pengembangan perikanan tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DISLUTKAN
Percepatan penurunan kemiskinan	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat	PUPR

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	OPD
Percepatan penurunan kemiskinan	Program Pengembangan Perumahan	Pemb./Peningkatan Rumah Sederhana Sehat	PUPR
Percepatan penurunan kemiskinan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pendidikan dan Pelatihan TTG, Tenaga Kerja Mandiri dan Kewirausahaan	Disnakertrans
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyiapan Pelatihan/Bimbingan Teknis sertifikasi dan bimbingan produktivitas tenaga	Disnakertrans
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Pembinaan Pengelolaan BUMDes	DPMD
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pengembangan mutu produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)	DISPERINDAG
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	DISPERINDAG
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	DISPERINDAG
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program peningkatan kualitas koperasi	Peningkatan dan pengembangan kerjasama usaha koperasi	DINAS KOPERASI & UKM

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	OPD
iklim investasi			
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan/Pengelolaan Kawasan Horti Park	DINAS PERTANIAN
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan produksi tanaman hortikultura	DINAS PERTANIAN
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan produktifitas tanaman perkebunan	DINAS PERTANIAN
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengolahan pasca panen dan pemasaran produksi hortikultura	DINAS PERTANIAN
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengolahan pasca panen dan pemasaran produksi perkebunan	DINAS PERTANIAN
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program pengembangan budidaya perikanan	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	DISLUTKAN
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program pengembangan budidaya perikanan	Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	DISLUTKAN
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	DINAS PARIWISATA

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	OPD
unggulan dan peningkatan iklim investasi			
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program Pengembangan Pariwisata	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Promosi Pariwisata	DINAS PARIWISATA
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program Pengembangan Pariwisata	Pengembangan Destinasi	DINAS PARIWISATA
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	DPMTSP
Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan Jalan Kabupaten	Dinas PUPR
Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan	Dinas PUPR
Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan	Dinas PUPR
Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rehabilitasi Embung dan Jaringan Irigasi, Pemb. Embung Penampung Air	Dinas PUPR
Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman	Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan	Penyediaan Sarana Prasarana Penerangan jalan dan Pertamanan	Dinas Perkim
Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas	Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan	Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas	Dinas Perkim

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	OPD
pemukiman			
Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman	Program Peningkatan Pengamanan, Penertiban dan Keselamatan Jalan	Pengadaan Fasilitas sarana dan prasarana Keselamatan Jalan	Dishub
Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pemeliharaan sistem informasi terhadap layanan publik	Diskominfo
Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman	Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang	Dinas PUPR
Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman	Program Kesiapsiagaan Bencana	Pembinaan dan Penanganan Daerah Rawan Kekeringan	BPBD
Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman	Program Kesiapsiagaan Bencana	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	BPBD
Penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Dinsos
Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Disdukcapil
Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan	Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Umum	Kecamatan dan Kelurahan
Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan dan penatausahaan Pajak Daerah/Retribusi	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Pendataan, Pendaftaran, Penatausahaan dan Pengembangan Potensi Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca Covid-19, ditetapkan program kegiatan prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.2
Program dan Kegiatan Prioritas Pemulihan Pasca Covid-19
Tahun 2021

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	OPD
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Dikes
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Revitalisasi sistem kesehatan	Dikes
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Dikes
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penanggulangan Kurang Gizi pada anak dan balita	Dikes
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	DPMD
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Dikes
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Dikes
Gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pembangunan sarana penunjang Rumah Sakit	Dikes
Percepatan penurunan kemiskinan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pengembangan program SLRT	Dinsos
Percepatan penurunan kemiskinan	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	DINAS KOPERASI & UKM
Percepatan penurunan kemiskinan	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana KUKM	DINAS KOPERASI & UKM
Peningkatan nilai tambah	Program Pengembangan	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Promosi Pariwisata	DINAS PARIWISATA

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	OPD
produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Pariwisata		
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program Pengembangan Pariwisata	Pengembangan Destinasi	DINAS PARIWISATA
Peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	DPMTSP

Tabel 5.3
Program dan Target Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2021

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA 2021	PELAKSANA
I	URUSAN WAJIB				
A	URUSAN PELAYANAN DASAR				
1	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN				
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	%	81,99	OPD pelaksana urusan Pendidikan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	%	106,99	OPD pelaksana urusan Pendidikan
		APK SMP/MTs	%	100	
		APM SD/MI	%	100	
		APM SMP/MTs	%	100	
		Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusi	%	85,5	
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase melek huruf usia 15-55 tahun	%	92,8	OPD pelaksana urusan Pendidikan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% PTK PAUD bersertifikasi	%	92,86	OPD pelaksana urusan Pendidikan
		% PTK SD bersertifikasi	%	97,57	
		% PTK SMP bersertifikasi	%	95,01	
2	BIDANG URUSAN KESEHATAN				
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks Kepuasan layanan kesehatan dasar	Poin	70,71	OPD pelaksana urusan Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka morbiditas	%	12	OPD pelaksana urusan Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA 2021	PELAKSANA
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks Kepuasan layanan kesehatan rujukan	Poin	68,02	OPD pelaksana urusan Kesehatan
3	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Cakupan Layanan jaringan Irigasi	Ha	49.517	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	%	95,67	
	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jalan yang dibangun terhadap rencana induk pengembangan jalan	%	82,52	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan yang kondisinya baik (mantap)	%	75,79	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pemenuhan ketersediaan dokumen RDTR	%	33,33	OPD pelaksana urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	%	85	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan gedung pemerintahan sesuai standar	%	100	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Program Pengembangan Perumahan	Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Unit	1.000	OPD pelaksana urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
	Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan	Persentase kawasan permukiman yang PSU permukimannya dalam kondisi baik (jalan lingkungan, drainase, pju)	%	54,1	OPD pelaksana urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Angka kejadian konflik antar etnis	Kejadian	0	OPD pelaksana urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	Program pendidikan politik masyarakat	angka partisipasi pemilih pada pilpres, pileg dan pilkada	%	70	OPD pelaksana urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA 2021	PELAKSANA
	Program Penanganan Konflik Sosial	konflik sosial yang terselesaikan	%	100	OPD pelaksana urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	penyakit masyarakat	Kasus	36	OPD pelaksana urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Angka pelanggaran perda dan Perkada	Kasus	270	
	Program Kesiapsiagaan Bencana	Desa tangguh bencana	Desa	23	OPD pelaksana urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Persentase korban bencana yang tertangani	%	100	
	Program Penanganan Bencana Kebakaran	Rata-rata Kecepatan dan ketepatan waktu penanganan kebakaran	Menit	15	OPD pelaksana urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6	BIDANG URUSAN SOSIAL				
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Penanganan PMKS	%	42,56	OPD pelaksana urusan Sosial
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Lembaga sosial yang aktif	%	53,00	OPD pelaksana urusan Sosial
B	URUSAN NON PELAYANAN DASAR				
1	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA				
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pencari kerja terdaftar yang terserap	%	95,31	OPD pelaksana urusan Tenaga Kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Sengketa ketenagakerjaan	Kasus	14	OPD pelaksana urusan Tenaga Kerja
2	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	OPD pelaksana urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3	BIDANG URUSAN PANGAN				
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Konsumsi Protein	gram/kapita/hari	81	OPD pelaksana urusan Pangan
		Konsumsi Energi	kilokalori/kapita/hari	2.300,00	
4	BIDANG URUSAN PERTANAHAN				
	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan fasilitasi pembuatan sertifikat tanah	%	100	OPD pelaksana urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5	BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	54	OPD pelaksana urusan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA 2021	PELAKSANA
					Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Sumber mata air yang debit airnya terjaga	Titik	12	OPD pelaksana urusan Lingkungan Hidup
	Program Pelayanan Persampahan	Jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang di tangani	M3/hari	20,82	OPD pelaksana urusan Lingkungan Hidup
6	BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat kepemilikan KTP elektronik	%	96,93	OPD pelaksana urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		Tingkat kepemilikan akta kelahiran	%	93,41	
		Tingkat kepemilikan kartu keluarga	%	97,23	
7	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	Program pengembangan ekonomi pedesaan	Rata-rata unit usaha BUMDes	Unit	2,3	OPD pelaksana urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa
		Jumlah desa wisata	desa	4	
	Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa aktif	lembaga	45	OPD pelaksana urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa
		Jumlah lembaga adat aktif	lembaga	45	
	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	Penetapan APBDes Tepat waktu	%	26,77	OPD pelaksana urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa
		Rata-rata Realisasi APBDes	%	97,9	
8	BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	Program Keluarga Berencana	Rasio peserta KB dengan Pasangan Usia Subur	%	69,7	OPD pelaksana urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif	%	68	
9	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN				
	Program Peningkatan Pengamanan, Penertiban dan Keselamatan Jalan	Angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	110	OPD pelaksana urusan Perhubungan
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Rasio kendaraan per jumlah penumpang	Ratio	01:40	OPD pelaksana urusan Perhubungan
10	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	%	36,36	OPD pelaksana urusan Komunikasi dan informatika

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA 2021	PELAKSANA
11	BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan UMKM	%	0,33	OPD pelaksana urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah
	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Koperasi berkualifikasi berkualitas dan sangat berkualitas	Buah	171	OPD pelaksana urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah
12	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL				
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi PMA	US \$ 000	1.580.810	OPD pelaksana urusan Penanaman modal
		Nilai investasi PMDN	Rp (juta)	1.327.046	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan	poin	80	OPD pelaksana urusan Penanaman modal
13	BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi (Provinsi, nasional dan internasional)	Orang	20	OPD pelaksana urusan Kepemudaan dan olah raga
		Jumlah pemuda berprestasi	Orang	5	
		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi	5	
14	BIDANG URUSAN STATISTIK				
	Program pengembangan data/informasi	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	%	100	OPD pelaksana urusan Statistik
15	BIDANG URUSAN PERSANDIAN				
	Program persandian daerah	Persentase pengamanan informasi daerah	%	100	OPD pelaksana urusan Persandian
16	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN				
	Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan	%	5	OPD pelaksana urusan Kebudayaan
		Persentase situs budaya yang dilestarikan	%	10	
17	BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN				
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Orang/Tahun	33.970	OPD pelaksana urusan Perpustakaan
18	BIDANG URUSAN KEARSIPAN				
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Indeks Kecepatan layanan permintaan kebutuhan arsip	Poin	3	OPD pelaksana urusan Kearsipan
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase dokumen arsip yang terselamatkan	%	100	OPD pelaksana urusan Kearsipan
II	URUSAN PILIHAN				
1	BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan Budidaya – Ikan	ton/tahun	35.515	OPD pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan
		Produksi Perikanan Budidaya - Rumput Laut	ton/tahun	40.049	
	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	2.482	OPD pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA 2021	PELAKSANA
	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton/tahun	4.509,09	OPD pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan
		Produksi garam rakyat	ton/tahun	3.407	
2	BIDANG URUSAN PARIWISATA				
	Program pengembangan pariwisata	angka kunjungan wisatawan asing	Orang/Tahun	90.000	OPD pelaksana urusan Pariwisata
		angka kunjungan wisatawan domestik	Orang/tahun	83.782	
		Rata-rata lama tinggal	hari	3,5	
3	BIDANG URUSAN PERTANIAN				
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Unggulan			OPD pelaksana urusan Pertanian
		- Padi	ton/tahun	511.597	
		- Jagung	ton/tahun	43.396	
		- Kedelai	ton/tahun	48.337	
		Produksi Hasil Perkebunan Unggulan			
		- Tembakau virginia	ton/tahun	20.712	
		- Tembakau rajangan	kw/tahun	1.176	
		- Melon	ton/tahun	12.631	
		- Kopi	ton/tahun	408,32	
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Populasi ternak sapi	ekor	172.521	OPD pelaksana urusan Pertanian
4	BIDANG URUSAN PERDAGANGAN				
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Nilai omset perdagangan/nilai transaksi	Rupiah	116.792.265.200	OPD pelaksana urusan Perdagangan
		Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang menempati ruang sesuai peruntukannya	%	17,8	
5	BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN				
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Nilai Produksi IKM	Rupian	54.773.765.000	OPD pelaksana urusan Perindustrian
6	BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI				
	Program Pengembangan dan pembinaan transmigrasi	Jumlah keluarga transmigrasi yang difasilitasi	KK	39	OPD pelaksana urusan Transmigrasi
III	FUNGSI PENUNJANG URUSAN				
1	PERENCANAAN				
	Program perencanaan pembangunan daerah	persentase kesesuaian program dan kegiatan RKPD dengan APBD	%	100	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Perencanaan
2	KEUANGAN				
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	poin	4	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Keuangan
		Indeks rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan	poin	3	
		Validitas data aset daerah	%	90	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Target Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	229.544.144.877	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan keuangan
3	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	Program Peningkatan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Daerah	Persentase PNS yang kompeten	%	66	OPD pelaksana Fungsi penunjang

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA 2021	PELAKSANA
					urusan Kepegawaian
	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	%	70,71	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Kepegawaian
4	PENGAWASAN				
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase tindaklanjut hasil temuan pengawasan	%	90	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pengawasan
		Kapabilitas APIP	level	3	
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Hasil penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan	%	100	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Penelitian dan pengembangan
6	PEMERINTAHAN UMUM				
	Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah	Persentase rumah ibadah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	19	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum
	Program Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	%	100	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tercukupinya kebutuhan kedinasan KDH	%	100	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Perda yang ditetapkan	%	57	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	%	100	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum

Tabel 5.4
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2021

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2021
1	SEKRETARIAT DAERAH	27.824.470.572,00
2	SEKRETARIAT DPRD	19.740.763.000,00
3	INSPEKTORAT	5.308.345.200,00
4	DINAS PENDIDIKAN	140.263.205.298,00
5	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4.057.474.950,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2021
6	DINAS KESEHATAN	220.511.941.399,00
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	105.717.057.150,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	120.970.785.460,00
9	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	34.683.083.000,00
10	DINAS SOSIAL	7.265.923.200,00
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9.342.653.400,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	21.708.395.400,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.603.375.800,00
14	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	11.999.460.300,00
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	4.862.475.600,00
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17.193.222.400,00
17	DINAS PERTANIAN	38.239.055.400,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.020.603.600,00
19	DINAS P3AP2 DAN KELUARGA BERENCANA	7.131.251.800,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.850.114.800,00
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37.911.352.000,00
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	3.413.807.600,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.877.438.400,00
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.502.755.550,00
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.036.969.200,00
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.799.267.880,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.998.711.200,00
28	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.453.349.000,00
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.500.936.400,00
30	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.231.353.776,00
31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.906.309.400,00
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	2.617.435.800,00
33	KANTOR CAMAT PRAYA	16.173.463.000,00
34	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH	6.216.516.800,00
35	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT	1.418.235.800,00
36	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA	1.360.319.000,00
37	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR	1.378.943.000,00
38	KANTOR CAMAT PUJUT	1.519.723.800,00
39	KANTOR CAMAT JANAPRIA	1.397.526.600,00
40	KANTOR CAMAT KOPANG	1.436.999.000,00
41	KANTOR CAMAT BATUKLIANG	1.339.440.600,00
42	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA	1.403.798.200,00
43	KANTOR CAMAT PRINGGARATA	1.391.908.800,00
44	KANTOR CAMAT JONGGAT	1.430.151.200,00
	JUMLAH	941.010.369.735,00

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



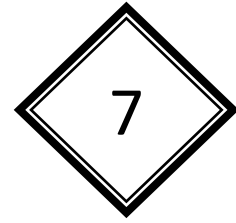
Salah satu metode pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dengan melihat ketercapaian indikator kinerja utama daerah yang bertujuan memberi gambaran atas pencapaian visi misi kepala daerah selama periode masa jabatan. Indikator kinerja utama daerah menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada setiap periode pelaksanaan RPJMD dapat dicapai. Realisasi indikator kinerja utama daerah sampai dengan tahun 2019 serta target di tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama
Realisasi 2019 & Target Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi sampai 2019	Target kinerja 2021	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)
1	Indeks Toleransi	Poin	3,56	3,56	3,45
2	Tingkat kriminalitas)*	Kasus/100.000 penduduk	92,82	81,63	81,63
3	IPM)	Poin	66,36	67,87	67,87
4	Angka Kemiskinan)	%	13,63	13,22	13,86
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi)	%	4,07	3,75	6,61
6	Indeks Gini)*	Poin	0,332	0,331	0,332
7	Indeks Wiliamson)*	Poin	0,40	0,39	0,39
8	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	84,91	84,91	79,11
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,25	66,25	53,5
10	Ketaatan terhadap RTRW	%	81,40	86,71	86,71
11	Nilai EKPPD)*	Poin	3,1254	3,1545	3,1545
12	Nilai SAKIP)*	Nilai	CC	B	B
13	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP

*) Realisasi 2018

BAB VII PENUTUP



Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas perencanaan juga sangat ditentukan oleh komitmen para pengelola program pembangunan dan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai implementasi tujuan di atas disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 yang merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai pedoman menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2021 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2021 berdasarkan RKPD 2021.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT